LEMHANNAS PRESS

UNJ PRESS

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.
Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A

REJUVENASI LEMHANNAS RI

GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

Editor:

Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan, S.H., S.I.K., M.H.
Vicky Fernando, S.E., M.Ak.,CRMO., CBV., CTIA.
Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

REJUVENASI LEMHANNAS RI

GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.
Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A

Editor:
Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan, S.H., S.I.K., M.H.
Vicky Fernando, S.E., M.Ak.,CRMO., CBV., CTIA.
Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M.

REJUVENASI LEMHANNAS RI
GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

Penulis : Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si
Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.
Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A

Editor : Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan, S.H., S.I.K., M.H.
Vicky Fernando, S.E., M.Ak.,CRMO., CBV., CTIA.
Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M.

Desain sampul : Abu Hisyam

Tata letak : Abu Hisyam

Cetakan Juni 2025

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh:

Penerbit UNJ Press
Gedung UTC UNJ Lt. 2, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Email: edura.unj@unj.ac.id atau unj.press@unj.ac.id
CP: 081296964182

UNJ Press telah menjadi anggota :
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
No. Anggota: 001.126.1.10.2020

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
No. 585/Anggota Luar Biasa/DKI/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penerbit Lemhannas Press dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan buku ini sebagai wujud komitmen intelektual dan kebangsaan dalam upaya memperkuat fondasi Ketahanan Nasional Indonesia. Di tengah derasnya arus perubahan global dan kompleksitas tantangan zaman, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pendekatan-pendekatan lama dalam membangun ketahanan bangsa tidak lagi memadai. Perlu ada pembaruan paradigma, penyesuaian kelembagaan, dan revitalisasi nilai yang bersifat menyeluruh dan berjangka panjang.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), sebagai kawah candradimuka pencetak kader pimpinan nasional, telah menjalani perjalanan panjang selama lebih dari enam dekade. Dalam lintasan sejarahnya, Lemhannas RI telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila, memperkuat wawasan kebangsaan, serta memupuk integritas kepemimpinan bangsa. Namun, sebagaimana halnya setiap institusi strategis, Lemhannas RI pun kini menghadapi tuntutan zaman untuk bertransformasi.

Buku ini hadir untuk merespons kebutuhan tersebut. Ia merupakan hasil perenungan, pembacaan terhadap dinamika global, serta analisis terhadap arsitektur ketahanan nasional masa depan. Di dalamnya terkandung satu pesan sentral: Rejuvenasi Lemhannas RI adalah keniscayaan strategis untuk mewujudkan Indonesia Maju. Rejuvenasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan struktural atau kosmetik, tetapi pembaruan

menyeluruh yang menyentuh visi, misi, cara berpikir, serta strategi operasional kelembagaan. Ia adalah bentuk penyesuaian aktif terhadap era baru—era yang menuntut lembaga negara untuk lebih lincah, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Buku ini memaparkan bagaimana Ketahanan Nasional tidak lagi cukup dipahami dalam kerangka defensif atau statis, tetapi sebagai kekuatan dinamis yang mampu menjadi motor transformasi. Ditekankan pula enam pilar strategis baru dalam kerangka ketahanan nasional: ideologi, sosial budaya, ekonomi, ekologi dan iklim, digital teknologi, serta pemerintahan. Pilar-pilar ini menjadi fondasi dalam menjawab disrupsi zaman yang bersifat multidimensi—mulai dari krisis iklim, ancaman siber, polarisasi sosial, hingga ketegangan geopolitik.

Melalui narasi dan argumentasi yang tertuang dalam buku ini, penerbit berharap pembaca—baik dari kalangan pemerintahan, akademisi, dunia usaha, maupun generasi muda—dapat menangkap urgensi akan perlunya rejuvenasi. Harapannya, Lemhannas RI dapat terus memainkan peran vitalnya sebagai "Raksaka Dharma"—penjaga nilai kebangsaan dan navigator strategis bangsa Indonesia dalam meniti jalan menuju masa depan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan acuan strategis dalam memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia secara menyeluruh. Semoga pula ia menjadi bagian dari ikhtiar kolektif bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Mei 2025

Lemhannas Press

Daftar Isi

Kata Pengantar dari Penerbit iii
Daftar Isi v
Prakata Penulis vii
BAB 1 KETAHANAN NASIONAL DAN PERADABAN MASA DEPAN 1
Ketahanan Nasional: Dari Konsep Statis ke Dinamis 3
Indonesia di Simpang Jalan Sejarah 5
Paradigma Baru: Pilar-Pilar Ketahanan Masa Depan 7
Ketahanan dan Peradaban: Membangun Legacy Bangsa 9
Ketahanan dan Inovasi: Pilar Ganda Masa Depan 10
Kesimpulan 12

BAB 2 KOMPLEKSITAS TANTANGAN MASA DEPAN DAN PILAR KETAHANAN BARU 15
Tantangan Global yang Saling Terhubung 17
Pilar Ketahanan Nasional: Relevansi dan Pembaruan 19
Menghubungkan Pilar-Pilar: Sinergi dan Integrasi 23
Kesimpulan 25

BAB 3 REJUVENASI LEMHANNAS RI SEBAGAI MOTOR STRATEGIS BANGSA 27
Lemhannas RI dalam Sejarah dan Perkembangannya 29
Rejuvenasi Lemhannas: Dimensi Struktural dan Substansial 30
Lemhannas sebagai 'Think Tank' Strategis Negara 35
Mendorong Kepemimpinan Nasional yang Visioner 37
Jejaring Global dan Diplomasi Strategis 39
Kesimpulan 41

BAB 4 INOVASI BERKELANJUTAN SEBAGAI INTI KETAHANAN NASIONAL 43
Inovasi dan Resiliensi: Dua Sisi Satu Koin 45
Ketahanan Nasional dalam Era Digital 47
Green Innovation dan Ketahanan Ekologis 48

Inovasi Sosial sebagai Pilar Ketangguhan Masyarakat 50
Peran Lemhannas dalam Mendorong Ekosistem Inovatif 52
Membangun Budaya Inovatif Nasional 53
Kesimpulan 55

BAB 5 PERAN STRATEGIS GENERASI MUDA DALAM KETAHANAN DAN KEPEMIMPINAN MASA DEPAN 57
Generasi Muda dan Bonus Demografi 59
Dimensi Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional 60
Tantangan dalam Pemberdayaan Generasi Muda 65
Strategi Nasional untuk Memberdayakan Generasi Muda 66
Lemhannas RI dan Kepemimpinan Muda Masa Depan 71
Kesimpulan 72

BAB 6 MENJEMPUT MASA DEPAN DENGAN KEBERANIAN 75
Keberanian sebagai Pilar Kepemimpinan Strategis 76
Menjawab Tantangan Global dengan Ketahanan Inklusif 78
Meneguhkan Identitas Bangsa di Tengah Arus Globalisasi 80
Transformasi Digital dan Peran Negara 81
Keberanian Lingkungan: Transisi ke Ekonomi Hijau 83
Mempercepat Kepemimpinan Generasi Baru 85
Rejuvenasi Lemhannas sebagai Cerminan Keberanian Institusional 87
Kesimpulan 89

BAB 7 JALAN MENUJU KETAHANAN NASIONAL BARU 91
Membangun Ekosistem Ketahanan yang Dinamis 94
Pilar Ketahanan Baru: Basis Strategi Indonesia Maju 96
Lemhannas RI: Navigator Ketahanan Nasional 98
Kepemimpinan Nasional dan Ketahanan Berbasis Inovasi 100
Menutup Masa Lalu, Membuka Masa Depan 102
Menjadi Bangsa Pemimpin, Bukan Pengikut 104

Daftar Pustaka 107
Tentang Penulis 112
Tentang Editor 119

PRAKATA

Buku ini lahir dari pergulatan pemikiran yang panjang dan refleksi mendalam atas tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia di abad ke-21. Sebagai bagian dari Lemhannas RI, penulis menyadari bahwa dunia tempat kita hidup kini telah berubah secara fundamental. Kita memasuki era di mana ketidakpastian menjadi keniscayaan, dan ketahanan—baik individu maupun kelembagaan—adalah syarat utama untuk bertahan sekaligus melompat lebih jauh ke depan.

Sebagai lembaga yang mengemban mandat strategis untuk membina kepemimpinan nasional dan memperkuat ketahanan bangsa, Lemhannas RI berada pada titik historis yang menentukan. Pada usia yang ke-60 tahun, momentum ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga panggilan untuk berefleksi dan bertransformasi. Lemhannas RI harus mampu membaca tanda-tanda zaman dan meresponsnya secara cepat, tepat, dan bijaksana.

Melalui buku ini, penulis berupaya merumuskan sebuah narasi yang tidak hanya menggambarkan posisi Lemhannas RI saat ini, tetapi juga arah pembaruannya ke depan. Konsep *rejuvenasi* menjadi gagasan kunci yang penulis angkat, karena penulis meyakini bahwa setiap institusi strategis harus senantiasa memperbarui dirinya agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru. Rejuvenasi dalam konteks Lemhannas RI berarti memperkuat peran substantifnya sebagai penjaga nilai, pusat pemikiran strategis, serta penghasil kader-kader pemimpin nasional yang memiliki integritas, wawasan kebangsaan, dan visi global.

Buku ini disusun dengan pendekatan multidimensi, mencakup perspektif ideologi, sosial-budaya, ekonomi, lingkungan hidup, teknologi digital, dan tata kelola pemerintahan. Enam pilar ketahanan nasional yang baru penulis paparkan sebagai kerangka kerja konseptual untuk menjawab tantangan era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) dan bahkan BANI (*Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible*). Buku ini juga memberi ruang khusus untuk peran strategis generasi muda sebagai bonus demografi yang harus diberdayakan menjadi agen perubahan dan inovator masa depan.

Penulis menyadari bahwa buku ini bukanlah akhir dari sebuah gagasan, tetapi awal dari sebuah dialog kebangsaan yang lebih besar. Penulis mengajak segenap komponen bangsa—pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan terutama generasi muda—untuk bersama-sama menjemput masa depan Indonesia dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kerja keras yang kolektif.

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak di lingkungan Lemhannas RI yang telah memberikan kontribusi dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi kecil namun bermakna dalam upaya kita bersama membangun Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan bermartabat.

Jakarta, Mei 2025

Penulis

BAB 1

Ketahanan Nasional dan Peradaban Masa Depan

Dunia kini tengah berada di persimpangan perubahan yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Tatanan global yang dulu terasa kokoh dan dapat diprediksi kini bergeser menjadi sesuatu yang rapuh dan penuh tantangan. Gejolak geopolitik yang terus berlanjut, persaingan sengit antarnegara adidaya, serta ancaman global seperti krisis iklim dan pandemi telah mengguncang pondasi keberlangsungan berbagai bangsa. Ditambah lagi dengan disrupsi teknologi digital yang mengubah hampir setiap aspek kehidupan serta ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, seluruh elemen ini membentuk lanskap dunia yang kompleks dan dinamis. Dalam kondisi seperti ini, konsep Ketahanan Nasional tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai urusan keamanan atau militer, melainkan sebagai fondasi utama yang menentukan masa depan dan keberlangsungan sebuah bangsa di peradaban global yang baru.

Perubahan yang terjadi bukan lagi bersifat lambat dan terukur, melainkan bersifat eksponensial, di mana satu perubahan kecil dapat menimbulkan dampak besar dalam waktu singkat. Istilah VUCA—yang melambangkan *Volatile* (bergejolak), *Uncertain* (tidak pasti), *Complex* (kompleks), dan *Ambiguous* (ambigu)—telah lama digunakan untuk menggambarkan dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, kini dunia memasuki era BANI, yakni *Brittle* (rapuh), *Anxious* (cemas), *Nonlinear* (tidak linier), dan *Incomprehensible* (tak terjangkau pemahaman). Konsep ini lebih tepat menggambarkan kerentanan sistem global dan kesulitan memahami arah perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga.

Dalam situasi yang demikian, pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang paling kuat atau paling kaya, melainkan siapa yang mampu menjadi paling adaptif dan resilien. Ketahanan Nasional harus diperkuat melalui kemampuan bangsa untuk menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan, mempertahankan integritas sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta menjaga persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan bukan sekadar bertahan dari ancaman eksternal, tetapi juga kesiapan internal untuk bertransformasi dan berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks peradaban masa depan, Ketahanan Nasional juga harus dipandang sebagai kekuatan kolektif yang dibangun melalui kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan responsif. Kepemimpinan yang mampu membaca tanda-tanda zaman, memfasilitasi inovasi, serta memperkuat solidaritas sosial menjadi kunci utama dalam menjaga dan membangun daya tahan bangsa. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan adaptif, upaya memperkokoh Ketahanan Nasional akan sulit diwujudkan.

Indonesia, dengan keragamannya yang luas dan posisi strategisnya di kancah global, memiliki potensi besar untuk

menjadi bangsa yang resilien dan berdaya saing di masa depan. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, mulai dari isu kesenjangan sosial, ancaman disintegrasi, hingga kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan globalisasi. Oleh karena itu, penguatan Ketahanan Nasional harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, melibatkan seluruh elemen bangsa dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.

Bab ini membuka pemahaman bahwa Ketahanan Nasional adalah pondasi utama dalam menghadapi peradaban masa depan yang penuh ketidakpastian. Bangsa yang mampu membangun ketahanan dengan prinsip adaptasi, solidaritas, dan kepemimpinan visioner, akan mampu melewati tantangan zaman dan menempatkan diri sebagai kekuatan yang berpengaruh di dunia. Ketahanan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal membangun peradaban yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi yang akan datang.

A. Ketahanan Nasional: Dari Konsep Statis ke Dinamis

Sejak masa kemerdekaan, Ketahanan Nasional telah menjadi pilar utama dalam merancang arah dan strategi pembangunan Indonesia. Dalam pengertiannya yang klasik, Ketahanan Nasional sering dilihat sebagai kondisi tetap—sebuah benteng kokoh yang menjaga bangsa dari segala ancaman eksternal maupun internal. Konsep ini mengandung makna keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Namun, sering kali konsep tersebut dipahami secara sektoral dan statis, hanya terbatas pada aspek militer atau keamanan semata. Akibatnya, Ketahanan Nasional tidak berkembang secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berubah.

Memasuki era global yang serba cepat dan penuh ketidakpastian, Ketahanan Nasional tidak lagi dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang kaku dan terpaku pada satu sektor

saja. Ia harus berevolusi menjadi sebuah kerangka strategis yang dinamis dan konvergen, menyatukan berbagai dimensi kehidupan nasional menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketahanan harus menjadi payung besar yang tidak hanya melindungi bangsa, tetapi juga mendorong kemajuan dan transformasi di seluruh bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, teknologi, dan lingkungan hidup.

Pendekatan dinamis ini menuntut cara pandang baru dalam membangun Ketahanan Nasional. Bangsa harus mampu mengelola kompleksitas yang semakin tinggi dan menghadapi ketidakpastian yang tidak lagi bisa diprediksi secara linear. Ketahanan bukan sekadar kemampuan bertahan dari serangan atau gangguan, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mentransformasikan diri. Dengan kata lain, Ketahanan Nasional menjadi instrumen strategis yang memungkinkan bangsa ini tidak hanya bertahan dalam menghadapi krisis, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik.

Sebagai contoh, tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan pandemi yang melanda dunia menunjukkan betapa cepatnya perubahan terjadi dan betapa pentingnya respons yang adaptif. Ketahanan Nasional harus mengantisipasi dan merespons isu-isu tersebut secara holistik, mengintegrasikan seluruh kekuatan nasional—baik sumber daya manusia, teknologi, maupun kebijakan publik—dalam satu sinergi yang kuat.

Selain itu, transformasi Ketahanan Nasional juga harus didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan partisipatif, yang mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Kepemimpinan yang memahami pentingnya inovasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas nasional akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ketahanan yang tidak hanya kokoh tetapi juga lincah dan adaptif.

Ketahanan Nasional yang dinamis juga mencerminkan kesadaran bahwa bangsa ini hidup dalam ekosistem global yang saling terhubung. Keamanan dan kesejahteraan nasional tidak bisa dipisahkan dari stabilitas dan kemajuan global. Oleh karena itu, penguatan Ketahanan Nasional harus dilakukan dengan perspektif terbuka, inklusif, dan fleksibel, siap untuk beradaptasi dengan perubahan global sekaligus menjaga nilai-nilai dan identitas nasional.

Secara esensial, Ketahanan Nasional yang dinamis adalah fondasi bagi Indonesia untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin dalam peradaban masa depan. Dengan kerangka strategis yang adaptif dan konvergen, bangsa ini dapat mengelola risiko dan peluang secara efektif, menjaga persatuan dan kedaulatan, sekaligus mendorong inovasi dan kemajuan yang berkelanjutan. Transformasi Ketahanan Nasional dari konsep statis menjadi dinamis ini adalah langkah krusial untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.

B. Indonesia di Simpang Jalan Sejarah

Indonesia tengah berdiri di titik krusial dalam perjalanan sejarahnya. Di hadapannya terbentang dua jalur yang sangat kontras. Jalur *pertama* adalah jalan menuju kejayaan—menuju Indonesia Emas 2045—ketika bangsa ini genap berusia satu abad. Jalan ini ditandai dengan peluang besar: bonus demografi yang menghadirkan tenaga produktif melimpah, kekayaan sumber daya alam yang strategis, serta posisi geografis yang menjadikan Indonesia sebagai simpul penting dalam perlintasan ekonomi dan politik global antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta antara Asia dan Australia.

Namun, jalan lainnya adalah jalan stagnasi dan kerentanan—jalan yang akan membawa bangsa ini pada krisis identitas, disintegrasi sosial, dan kemunduran sistemik jika kita gagal

memanfaatkan peluang dan mengelola tantangan dengan bijak. Indonesia berisiko terperangkap dalam jebakan negara berkembang, jika tidak mampu memperkuat Ketahanan Nasional yang menyeluruh dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Ketahanan Nasional kini tidak lagi hanya soal pertahanan teritorial atau ancaman militer semata. Ancaman kontemporer telah berkembang menjadi kompleks, multidimensional, dan sering kali tak kasatmata. Krisis iklim, misalnya, telah mengancam keberlanjutan ekosistem kita. Banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut mengancam kawasan pesisir dan pusat-pusat pertanian yang vital bagi ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, ruang digital yang tak terbatas kini menjadi medan baru perebutan pengaruh dan dominasi. Serangan siber, monopoli data oleh kekuatan global, serta ketergantungan pada teknologi luar negeri melemahkan kedaulatan digital kita. Polarisasi sosial yang diperparah oleh disinformasi semakin memperuncing perbedaan, menciptakan jurang pemisah antar kelompok masyarakat yang seharusnya saling memperkuat.

Ketimpangan sosial ekonomi pun tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Ketika sebagian besar rakyat belum merasakan manfaat pembangunan secara merata, rasa keadilan melemah, dan kepercayaan terhadap institusi negara ikut tergerus. Kepercayaan ini adalah fondasi utama bagi Ketahanan Nasional. Tanpa legitimasi, negara akan rapuh dari dalam, tak peduli seberapa kuat sistem formal yang dibangun.

Untuk itu, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga visioner secara moral dan strategis. Kepemimpinan yang mampu menjembatani keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pemerataan ekonomi ke

dalam satu visi besar: Indonesia yang tangguh, adil, dan berdaya saing global.

Di persimpangan ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan bersatu meniti jalan keemasan, atau terpecah dalam ketidakpastian? Sejarah menunggu jawaban, dan masa depan Indonesia ditentukan oleh keputusan kita hari ini.

C. Paradigma Baru: Pilar-Pilar Ketahanan Masa Depan

Di tengah dinamika global yang kian kompleks dan tidak menentu, Indonesia memerlukan lompatan paradigma dalam memahami dan membangun Ketahanan Nasional. Ketahanan tidak lagi cukup dipandang semata sebagai kemampuan mempertahankan diri dari ancaman fisik atau konflik bersenjata. Kini, ketahanan harus dilihat secara strategis sebagai sistem multidimensi yang adaptif terhadap perubahan zaman, krisis global, dan transformasi sosial. Untuk itulah, diperlukan kerangka baru yang holistik dan progresif, yang merumuskan pilar-pilar ketahanan masa depan.

Buku ini mengajukan enam pilar ketahanan strategis sebagai fondasi baru Ketahanan Nasional Indonesia ke depan.

Pertama, Ketahanan Ideologi. Di era keterbukaan informasi dan globalisasi, Pancasila sebagai dasar negara menghadapi tantangan serius dari ideologi transnasional yang mengusung ekstremisme, populisme, dan fundamentalisme. Ketahanan ideologi berarti menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi rujukan moral dan hukum yang dihormati seluruh warga.

Kedua, Ketahanan Sosial Budaya. Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Polarisasi sosial, hoaks, dan intoleransi menjadi ancaman nyata terhadap kohesi nasional. Ketahanan sosial budaya

dibangun melalui penguatan literasi kebangsaan, pendidikan karakter, serta ketangguhan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan toleransi.

Ketiga, Ketahanan Ekonomi. Krisis global telah menunjukkan rapuhnya ketergantungan pada sistem ekonomi eksternal. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemandirian ekonomi nasional, mendorong diversifikasi sumber daya, serta membangun ekonomi digital yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi disrupsi.

Keempat, Ketahanan Ekologi dan Iklim. Ancaman perubahan iklim adalah tantangan eksistensial abad ke-21. Ketahanan ekologis dibangun melalui transisi energi bersih, pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang makin sering terjadi.

Kelima, Ketahanan Teknologi dan Digital. Di era revolusi industri 4.0 dan 5.0, penguasaan teknologi menentukan masa depan bangsa. Ketahanan digital mencakup kedaulatan data, keamanan siber, dan kepemimpinan dalam inovasi teknologi yang berbasis pada potensi dan talenta nasional.

Keenam, Ketahanan Tata Kelola Pemerintahan. Pemerintahan yang adaptif, bersih, dan responsif menjadi fondasi kepercayaan publik. Ketahanan tata kelola dibangun melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Keenam pilar ini tidak berdiri sendiri. Mereka terjalin dalam satu ekosistem ketahanan nasional yang saling menopang dan memperkuat. Ketahanan ideologi memberi arah, ketahanan sosial budaya menjaga kohesi, ketahanan ekonomi menyokong kemandirian, ketahanan ekologi menjamin keberlanjutan, ketahanan teknologi membawa keunggulan, dan ketahanan tata kelola memastikan keberlanjutan kebijakan yang adil.

Dengan membangun paradigma baru ini, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh menjadi bangsa pemimpin di kancah global. Ketahanan bukan sekadar benteng pertahanan, melainkan fondasi kemajuan yang berkelanjutan.

D. Ketahanan dan Peradaban: Membangun *Legacy* Bangsa

Sejarah mencatat bahwa peradaban besar tidak semata dibangun oleh kekuatan militer atau kemegahan ekonomi. Romawi dengan legiun dan infrastrukturnya yang megah, Dinasti Han dan Tang di Tiongkok dengan sistem birokrasinya yang canggih, atau Kesultanan Ottoman dengan kekayaan budayanya—semuanya pada akhirnya tumbuh dan runtuh bukan karena kekalahan di medan perang semata, melainkan karena keretakan dari dalam: hilangnya nilai, memburuknya tata kelola, dan retaknya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya.

Pelajaran besar dari sejarah ini harus menjadi cermin bagi Indonesia. Di tengah usaha mencapai visi Indonesia Emas 2045, Ketahanan Nasional tidak bisa lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan dalam situasi krisis. Lebih dari itu, ketahanan adalah instrumen strategis untuk membangun dan menjaga warisan peradaban bangsa. Ia adalah jembatan antara perjuangan generasi terdahulu dan harapan generasi masa depan.

Ketahanan Nasional yang kokoh memungkinkan negara ini bukan hanya sekadar bertahan, tetapi tumbuh menjadi pusat peradaban yang memberi kontribusi bagi dunia. Ketahanan bukanlah alat represif negara, melainkan sistem daya tahan kolektif yang dibangun atas fondasi nilai—Pancasila, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Jika nilai-nilai ini luntur, sistem akan menjadi lemah. Jika kepercayaan publik menipis, maka tidak ada kekuatan politik atau ekonomi yang mampu menyelamatkan negara dari dekadensi.

Dalam konteks inilah, Lemhannas RI memiliki peran yang tak tergantikan. Sebagai lembaga strategis negara, Lemhannas tidak hanya menjadi pusat kajian ketahanan dan kebijakan nasional, tetapi juga menjadi wadah kaderisasi pemimpin bangsa yang berpikir jauh ke depan. Lemhannas RI berfungsi sebagai penjaga nalar kebangsaan, pelestari nilai-nilai luhur, dan penanam karakter kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman.

Peran Lemhannas harus lebih dari sekadar pengingat sejarah atau pembina stabilitas. Ia harus menjadi laboratorium masa depan—tempat lahirnya gagasan strategis, inovasi kebijakan, dan karakter pemimpin yang memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual. Lemhannas harus menghidupkan kembali semangat kenegarawanan yang tak hanya berpikir lima tahun ke depan, tetapi lima puluh hingga seratus tahun ke depan.

Membangun legacy bangsa berarti membangun daya tahan sistemik yang melampaui generasi. Peradaban tidak diwariskan melalui monumen fisik, tetapi melalui nilai, kepemimpinan, dan institusi. Di sinilah Ketahanan Nasional menjelma sebagai jantung peradaban Indonesia. Ia adalah energi yang menjaga nyala api perjuangan para pendiri bangsa agar tetap hidup dalam setiap generasi yang datang.

Jika Indonesia ingin dikenang sebagai bangsa besar dalam sejarah dunia, maka Ketahanan Nasional harus menjadi fondasi yang tak tergoyahkan—fondasi dari sebuah legacy yang abadi.

E. Ketahanan dan Inovasi: Pilar Ganda Masa Depan

Di tengah dunia yang terus berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, inovasi telah menjelma menjadi bentuk baru dari ketahanan. Bukan lagi kekayaan alam atau dominasi militer yang menentukan daya tahan sebuah bangsa, melainkan kemampuannya untuk beradaptasi, merespons, dan menciptakan solusi baru di tengah ketidakpastian. Negara-negara

yang berhasil bertahan dalam guncangan global seperti pandemi, krisis energi, hingga perang teknologi, adalah mereka yang mengandalkan inovasi sebagai jantung ketahanan nasional.

Dalam konteks Indonesia, tantangan dan peluang datang bersamaan. Disrupsi digital, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, serta tekanan sosial-ekonomi menuntut sebuah pendekatan baru dalam merancang masa depan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia harus menempatkan inovasi tidak sekadar sebagai sektor atau bidang tersendiri, melainkan sebagai *poros utama* pembangunan nasional dan ketahanan jangka panjang.

Inovasi di sini tidak terbatas pada penciptaan teknologi baru. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan: inovasi sosial dalam membangun solidaritas masyarakat yang inklusif; inovasi kebijakan yang mampu menjawab dinamika lokal dan global secara cepat; inovasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data; inovasi pendidikan yang menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis; serta inovasi dalam membentuk budaya kolaborasi lintas sektor dan generasi.

Ketahanan Nasional tanpa inovasi adalah kekuatan semu. Dalam era hiperkompetisi saat ini, negara yang tidak mampu membangun *ecosystem of innovation* akan tertinggal, tergantung, dan akhirnya melemah dari dalam. Ekosistem inovasi harus dibangun dari hulu ke hilir: mulai dari riset dasar hingga komersialisasi teknologi; dari ruang kelas hingga ruang publik; dari pemerintah pusat hingga desa-desa digital. Semua elemen bangsa—pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media—harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendorong percobaan, pembelajaran, dan pembaruan berkelanjutan.

Ketahanan dan inovasi adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi memberikan kemampuan adaptif dan fleksibel

dalam menghadapi dinamika eksternal, sementara ketahanan menyediakan landasan nilai dan arah strategis agar inovasi tidak kehilangan orientasi kebangsaan. Inovasi tanpa arah bisa destruktif, sementara ketahanan tanpa inovasi akan stagnan.

Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan publik, anggaran negara, sistem pendidikan, dan ekosistem riset didesain untuk mendukung lahirnya generasi inovator baru—yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan peduli pada keberlanjutan.

Di era masa depan, bangsa yang tangguh bukanlah bangsa yang paling besar atau paling kuat, tetapi bangsa yang paling inovatif. Dengan menjadikan ketahanan dan inovasi sebagai pilar ganda, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari tantangan global, tetapi juga siap memimpin peradaban baru yang adil, maju, dan berkelanjutan.

F. Kesimpulan

Bab pertama ini menegaskan bahwa Ketahanan Nasional bukan lagi sekadar doktrin pertahanan tradisional, melainkan telah berkembang menjadi *paradigma strategis* dalam membangun masa depan Indonesia. Dalam era global yang ditandai dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan disrupsi multidimensi, Ketahanan Nasional perlu dipahami secara menyeluruh sebagai *fondasi peradaban* bangsa.

Ketahanan hari ini tidak hanya berbicara tentang kemampuan militer atau stabilitas politik, tetapi juga mencakup kapasitas kolektif bangsa untuk beradaptasi, berinovasi, dan menjaga integritas sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan hidupnya. Ketahanan adalah kemampuan untuk tetap berdiri kokoh di tengah badai global, namun sekaligus juga memiliki visi untuk tumbuh dan memimpin dalam tatanan dunia baru.

Bab ini juga menyoroti bahwa Ketahanan Nasional adalah syarat eksistensial bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Negara tidak bisa bertahan, apalagi maju, jika tidak memiliki daya tahan sistemik yang kuat. Ketahanan bukanlah pilihan tambahan dalam pembangunan nasional, melainkan prasyarat utama agar pembangunan itu berkelanjutan dan berkeadilan. Tanpa ketahanan, segala kemajuan bersifat rapuh dan mudah runtuh oleh guncangan eksternal maupun konflik internal.

Menuju Indonesia Emas 2045, di mana kita memimpikan menjadi kekuatan besar dunia, Ketahanan Nasional harus menjadi kerangka dasar dalam setiap rumusan visi dan kebijakan strategis negara. Ia harus menjadi acuan dalam pendidikan, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga tata kelola pemerintahan. Dengan menjadikan ketahanan sebagai *core paradigm*, Indonesia tidak hanya bersiap menghadapi tantangan, tetapi juga membentuk peradaban baru yang unggul dan bermartabat.

Dalam konteks inilah, rejuvenasi Lemhannas RI menjadi sangat penting dan strategis. Lemhannas RI bukan hanya lembaga pendidikan dan kajian, tetapi juga simbol dan motor ideologis ketahanan bangsa. Revitalisasi peran Lemhannas berarti membangun kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan berkarakter, serta wawasan kebangsaan yang mendalam.

Rejuvenasi Lemhannas harus diarahkan untuk memperkuat fungsi utama lembaga ini sebagai think tank strategis dan pusat kaderisasi kepemimpinan nasional lintas sektor. Lemhannas harus tampil sebagai pelopor dalam merumuskan agenda-agenda kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap tantangan, tetapi juga proaktif dalam merancang masa depan. Ia harus menjadi ruang lahirnya pemimpin-pemimpin visioner yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Dengan demikian, Bab 1 ini menempatkan Ketahanan Nasional sebagai tulang punggung dari peradaban Indonesia masa depan—peradaban yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memberi kontribusi positif bagi dunia. Ketahanan adalah jembatan antara sejarah dan masa depan, antara perjuangan para pendiri bangsa dan cita-cita generasi penerus. Dan dari sinilah, upaya merancang Indonesia yang resilien, berdaulat, dan beradab harus dimulai.

BAB 2

Kompleksitas Tantangan Masa Depan dan Pilar Ketahanan Baru

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, memasuki abad ke-21, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan baru, tetapi juga kompleksitas ancaman yang bersifat saling terhubung, dinamis, dan multidimensi. Dalam lanskap global yang semakin tidak pasti, berbagai krisis datang secara simultan—mulai dari krisis iklim, transformasi digital, hingga eskalasi geopolitik. Semua ini menuntut paradigma baru dalam membangun Ketahanan Nasional.

Tantangan yang dihadapi bangsa saat ini bukan lagi dapat diatasi dengan pendekatan sektoral atau respons jangka pendek. Sebaliknya, tantangan-tantangan tersebut mengharuskan kita mengembangkan pendekatan sistemik dan adaptif, dengan merancang ulang fondasi Ketahanan Nasional agar sesuai dengan realitas dunia baru. Konsep ketahanan yang hanya berfokus pada pertahanan fisik atau keamanan teritorial tidak lagi memadai. Kita

memerlukan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ketahanan sebagai sistem daya tahan nasional yang melibatkan seluruh sektor kehidupan bangsa.

Transformasi global telah membentuk sebuah dunia yang sangat berbeda dari masa lalu. Krisis iklim kini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi ancaman eksistensial yang memengaruhi pangan, energi, dan kesehatan publik. Revolusi teknologi digital telah menciptakan dunia baru dengan logika kekuasaan yang sangat bergantung pada data, kecerdasan buatan, dan kontrol informasi. Sementara itu, disrupsi geopolitik, termasuk konflik antarnegara besar dan ketidakpastian tatanan global, telah mengaburkan batas antara perang dan damai, antara ekonomi dan keamanan.

Di tengah perubahan besar ini, Indonesia sebagai negara dengan potensi besar tidak bisa tinggal diam. Dengan posisi geostrategis di antara dua samudra dan dua benua, serta kekayaan sumber daya dan jumlah penduduk produktif yang besar, Indonesia memiliki kekuatan laten yang sangat besar. Namun, tanpa ketahanan yang tangguh dan terbarukan, potensi ini dapat berubah menjadi beban atau bahkan titik rawan.

Oleh karena itu, pembaruan pilar-pilar Ketahanan Nasional menjadi sebuah urgensi strategis. Pilar ketahanan yang dulu bersifat statis harus dikembangkan menjadi pilar yang dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Ketahanan tidak lagi bisa dipisahkan antara aspek militer dan non-militer, antara negara dan masyarakat. Ketahanan masa depan harus mencakup dimensi ideologi, sosial-budaya, ekonomi, ekologi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan, yang semuanya saling terhubung dan saling memperkuat.

Membangun pilar ketahanan baru berarti membangun *resilience architecture* yang bersifat inklusif, inovatif, dan berbasis

pada nilai-nilai kebangsaan. Ketahanan tidak dibangun di atas kekhawatiran, tetapi di atas visi bersama tentang masa depan bangsa. Dalam konteks ini, peran lembaga strategis seperti Lemhannas RI sangat penting untuk merumuskan ulang arah dan struktur ketahanan bangsa yang relevan dengan tantangan zaman.

Dengan memahami kompleksitas tantangan masa depan, Indonesia akan mampu menjadikan ketahanan sebagai kekuatan transformatif, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh, memimpin, dan mewariskan peradaban yang unggul bagi generasi berikutnya.

A. Tantangan Global yang Saling Terhubung

Dalam dinamika global yang semakin kompleks dan cepat berubah, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak lagi bersifat tunggal atau terpisah-pisah. Tantangan-tantangan tersebut saling terhubung dalam jejaring sistemik yang memengaruhi setiap aspek kehidupan bangsa. Ketahanan Nasional tidak dapat dibangun tanpa memahami dan merespons secara strategis tantangan global utama yang kini mengarah pada tekanan multidimensi terhadap stabilitas dan kedaulatan negara.

Setidaknya ada empat tantangan utama yang patut dicermati dan direspons secara holistik. *Pertama*, perubahan iklim dan krisis ekologi. Pemanasan global telah memicu eskalasi bencana alam, mulai dari banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga kenaikan permukaan air laut. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, berada pada posisi sangat rentan. Lebih dari sekadar isu lingkungan, krisis ekologi mengancam keberlanjutan sistem ekonomi, ketahanan pangan, dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, ketahanan ekologis tidak dapat dianggap sebagai isu pinggiran; ia adalah fondasi dari keberlanjutan bangsa. Ketahanan Nasional harus mencakup transisi energi bersih, perlindungan keanekaragaman hayati, dan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kedua, disrupsi teknologi dan ketimpangan digital. Revolusi industri 4.0 telah membawa kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Negara-negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi ini akan menjadi pemimpin baru dalam ekonomi dan pertahanan. Sebaliknya, negara yang hanya menjadi konsumen akan semakin tertinggal dan terjebak dalam ketergantungan struktural. Di Indonesia, ketimpangan digital antardaerah dan antarwilayah memperbesar jurang sosial dan ekonomi. Ketahanan digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal pemerataan akses, pengembangan SDM unggul, dan kedaulatan data nasional.

Ketiga, rivalitas geopolitik dan ketegangan regional. Kembalinya rivalitas kekuatan besar dunia, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menciptakan ketegangan baru di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara nonblok harus cermat dan taktis menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ketahanan dalam bidang diplomasi pertahanan, keamanan maritim, serta energi dan pangan harus diperkuat. Dalam konteks ini, kepemimpinan nasional dituntut mampu menjaga keseimbangan antara keterlibatan global dan perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional.

Terakhir, fragmentasi sosial dan disinformasi. Era digital tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga ancaman terhadap kohesi sosial. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi ekstremisme di ruang digital telah memperuncing polarisasi masyarakat. Ketahanan sosial budaya kini menghadapi ujian berat. Untuk itu, pembangunan karakter kebangsaan, literasi digital, dan penguatan identitas nasional menjadi bagian krusial dalam menjaga keutuhan bangsa.

Keempat tantangan ini menunjukkan bahwa Ketahanan Nasional masa kini dan masa depan tidak mungkin dibangun dengan pendekatan reaktif dan sektoral. Ia membutuhkan *grand*

strategy yang mengintegrasikan semua dimensi kehidupan bangsa secara adaptif dan antisipatif. Indonesia tidak boleh lengah. Di tengah dunia yang berubah cepat, ketahanan yang kuat dan inovatif adalah satu-satunya jalan untuk bertahan dan memimpin.

B. Pilar Ketahanan Nasional: Relevansi dan Pembaruan

Memasuki abad ke-21, bangsa Indonesia dihadapkan pada dinamika global yang semakin kompleks, cepat, dan tidak menentu. Ketahanan Nasional, yang selama ini menjadi fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan kesinambungan negara, kini perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap tantangan zaman. Lemhannas RI, sebagai institusi strategis dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan nasional, mengusulkan kerangka enam pilar Ketahanan Nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi, tetapi juga sebagai katalisator transformasi bangsa.

Pembaruan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka ketahanan yang telah ada sebelumnya, melainkan untuk memperkaya dan merekonstruksi pendekatan Ketahanan Nasional secara lebih integratif, adaptif, dan visioner. Enam pilar ini dibangun berdasarkan kesadaran bahwa ketahanan sejati adalah ketahanan yang hidup dalam nilai, tumbuh dalam sistem, dan kuat dalam aksi kolektif bangsa.

1. Pilar Ketahanan Ideologi

Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia, namun dalam dunia yang semakin terbuka dan terkoneksi, Pancasila menghadapi tantangan yang serius. Ideologi transnasional yang menyusup melalui berbagai kanal digital, budaya populer asing, hingga paham radikal, perlahan-lahan mengikis nilai-nilai luhur yang menjadi perekat kebangsaan.

Ketahanan ideologi bukan semata tentang mempertahankan simbol dan retorika, tetapi tentang bagaimana Pancasila

dapat dihidupkan dalam konteks kekinian. Internalitasinya harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, budaya organisasi, hingga kebijakan publik. Negara perlu memperkuat ekosistem ideologi Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan yang bermutu, revitalisasi organisasi kemasyarakatan keagamaan yang moderat, dan diseminasi nilai Pancasila melalui teknologi komunikasi yang relevan dengan generasi digital.

2. Pilar Ketahanan Sosial Budaya

Keberagaman adalah kekuatan Indonesia, namun tanpa pengelolaan yang baik, ia bisa berubah menjadi potensi perpecahan. Polarisasi sosial, politik identitas, hingga disinformasi di ruang digital telah menunjukkan bagaimana kohesi sosial dapat dengan cepat terfragmentasi. Oleh karena itu, ketahanan sosial budaya menjadi sangat penting sebagai pilar yang menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam keragaman.

Literasi budaya dan sejarah kebangsaan harus diperkuat agar setiap warga negara memahami akar bersama sebagai bangsa. Media massa dan platform digital perlu menjadi alat penguatan kesadaran kolektif, bukan sumber fragmentasi. Ketahanan sosial budaya bukan soal melestarikan budaya dalam bentuk statis, melainkan menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan dinamis untuk membangun integrasi nasional yang progresif dan adaptif.

3. Pilar Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah fondasi material bagi keberlanjutan suatu bangsa. Namun di era globalisasi dan disrupsi digital, ekonomi Indonesia tidak hanya dituntut untuk tumbuh, tetapi juga harus tahan banting dan adaptif. Pandemi COVID-19 telah menjadi pelajaran keras bahwa ketergantungan terhadap rantai pasok global dan minimnya

diversifikasi ekonomi membuat banyak negara, termasuk Indonesia, rentan terhadap guncangan eksternal.

Transformasi ekonomi nasional menuju struktur yang lebih mandiri dan inovatif harus menjadi prioritas strategis. Penguatan sektor UMKM, industri berbasis sumber daya lokal, transformasi pertanian modern, dan adopsi teknologi digital menjadi jalan untuk menciptakan ekonomi yang resilien. Selain itu, sistem perlindungan sosial yang inklusif harus dibangun untuk memastikan bahwa ketahanan ekonomi juga dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.

4. **Pilar Ketahanan Ekologi dan Iklim**

Krisis iklim bukanlah ancaman masa depan, melainkan tantangan masa kini yang nyata. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan ekologis dunia. Namun ironisnya, kerusakan lingkungan terus berlangsung akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, serta lemahnya tata kelola lingkungan.

Ketahanan ekologi dan iklim harus menjadi strategi nasional yang terintegrasi lintas sektor. Transisi menuju energi bersih, reformasi kebijakan kehutanan dan pertambangan, serta sistem mitigasi bencana yang modern perlu dipercepat. Pembangunan berkelanjutan bukanlah pilihan politik, tetapi keharusan moral untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan.

5. **Pilar Ketahanan Teknologi dan Digital**

Dalam era revolusi digital, data adalah sumber daya strategis baru. Ketergantungan terhadap teknologi asing menjadikan Indonesia rentan terhadap dominasi digital dan

ancaman keamanan siber. Di sisi lain, potensi teknologi untuk membangun daya saing bangsa sangat besar bila dikelola dengan baik.

Pilar ini menekankan pentingnya kedaulatan digital sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Pengembangan teknologi dalam negeri, pembentukan talenta digital unggul, serta regulasi yang berpihak pada inovasi lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan digital. Tak hanya itu, literasi digital juga harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar transformasi digital tidak melahirkan kesenjangan baru.

6. **Pilar Ketahanan Tata Kelola Pemerintahan**

Ketahanan bangsa tidak akan kuat tanpa tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif. Korupsi, birokrasi yang tidak adaptif, serta proses kebijakan yang tidak berbasis data menjadi hambatan serius dalam membangun negara yang tangguh.

Reformasi birokrasi harus berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan integritas personal. Teknologi digital harus digunakan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Di sisi lain, kepemimpinan nasional di semua level harus memiliki visi jauh ke depan, berorientasi pada hasil, serta mampu menyatukan berbagai kekuatan bangsa dalam satu arah tujuan strategis: Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

Enam pilar Ketahanan Nasional sebagai arsitektur bangsa masa depan ini adalah respon strategis terhadap dunia yang telah berubah secara fundamental. Mereka dirancang bukan sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai sistem nilai dan tindakan yang harus hidup dalam setiap kebijakan, institusi, dan kesadaran kolektif bangsa. Pilar-pilar ini saling berhubungan, saling memperkuat, dan hanya efektif jika diterapkan secara holistik.

Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, pembaruan Ketahanan Nasional ini adalah sebuah keniscayaan. Lemhannas RI, dengan posisinya sebagai lembaga pemikir dan pusat pengkaderan kepemimpinan nasional, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa enam pilar ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi terimplementasi sebagai *grand strategy* pembangunan nasional jangka panjang.

Ketahanan Nasional bukan sekadar alat pertahanan negara, melainkan arsitektur masa depan bangsa. Dalam dunia yang tidak pasti, bangsa yang mampu bertahan dan berkembang bukanlah yang terbesar atau terkaya, melainkan yang paling mampu beradaptasi, bekerja sama, dan terus memperbarui dirinya.

C. Menghubungkan Pilar-Pilar: Sinergi dan Integrasi

Dalam merancang arsitektur Ketahanan Nasional masa depan, tidak cukup hanya merumuskan pilar-pilar ketahanan secara sektoral. Yang jauh lebih penting adalah membangun keterkaitan yang erat di antara pilar-pilar tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi. Ketahanan Nasional bukanlah sekumpulan program terpisah, tetapi ekosistem yang saling memengaruhi dan saling memperkuat. Di sinilah urgensi sinergi dan integrasi menjadi krusial.

Setiap pilar ketahanan memiliki fungsi strategis masing-masing, namun tidak dapat berjalan efektif secara terpisah. Misalnya, penguatan ekonomi digital bukan hanya persoalan teknologi dan pasar. Ia membutuhkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, birokrasi yang lincah, SDM yang unggul dan beretika, serta jaminan keamanan data dan keberlanjutan ekologi. Ketahanan ideologi juga tidak bisa dilepaskan dari ketahanan sosial budaya, karena nilai-nilai kebangsaan akan lebih mudah meresap jika hidup dalam kebudayaan masyarakat yang kohesif.

Dengan demikian, Ketahanan Nasional masa depan harus dipahami sebagai sistem ekologi sosial-politik yang kompleks—

di mana perubahan dalam satu pilar akan berdampak pada pilar-pilar lainnya. Maka, pendekatan pembangunan ketahanan tidak bisa bersifat silo atau sektoral. Diperlukan model pendekatan yang lintas sektor (intersectoral), lintas generasi (intergenerational), dan lintas lembaga (interinstitutional), sehingga mampu membangun daya tahan sistemik dan kolektif.

Sinergi antarpilar juga memerlukan peran orkestrasi yang kuat dari lembaga negara. Di titik inilah, Lemhannas RI memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk membina kader kepemimpinan nasional dan menyusun rekomendasi strategis kebijakan, Lemhannas dapat dan harus menjadi simpul integrasi antar-pilar ketahanan.

Program-program pembinaan Lemhannas ke depan harus mampu memproyeksikan tantangan dan peluang jangka panjang bangsa, serta menyusun narasi strategis yang mempertemukan dimensi ideologi, sosial, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan tata kelola secara utuh. Di sisi lain, Lemhannas juga harus menjadi ruang kolaboratif lintas sektor—menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang: militer, sipil, akademisi, teknokrat, swasta, hingga generasi muda.

Dengan menjadi pusat pemikiran strategis (strategic think tank) yang bersifat lintas disiplin dan lintas generasi, Lemhannas RI dapat menjembatani disparitas sektoral dan memperkuat keselarasan visi nasional. Ketahanan Nasional yang terintegrasi bukan sekadar hasil dari koordinasi administratif, tetapi buah dari kesatuan visi, kesadaran kolektif, dan kepemimpinan yang mampu menjalin sinergi di tengah keragaman.

Ketahanan masa depan Indonesia bukan hanya soal kekuatan bertahan, tetapi tentang kemampuan bersinergi, berinovasi, dan bertransformasi secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa kompleksitas tantangan masa depan yang bersifat lintas sektor, saling terhubung, dan bergerak sangat cepat menuntut Indonesia untuk merekonstruksi secara serius paradigma Ketahanan Nasional. Ketahanan tidak lagi cukup dipahami secara sempit sebagai upaya bertahan dari ancaman eksternal atau konflik bersenjata. Di era baru ini, ketahanan adalah kemampuan suatu bangsa untuk beradaptasi, mentransformasi diri, dan tetap memelihara integritas serta arah strategisnya di tengah dinamika global yang tak menentu.

Revolusi teknologi, krisis iklim, fragmentasi sosial, hingga rivalitas geopolitik tidak bisa dihadapi dengan instrumen dan pola pikir lama. Oleh karena itu, pendekatan Ketahanan Nasional juga harus ditransformasikan menjadi sebuah kerangka yang holistik, dinamis, dan berorientasi masa depan. Enam pilar Ketahanan Nasional yang diajukan dalam bab ini—yaitu ideologi, sosial budaya, ekonomi, ekologi dan iklim, teknologi digital, serta tata kelola pemerintahan—bukanlah sekadar klasifikasi normatif, melainkan satu sistem yang saling berinteraksi dan menentukan satu sama lain.

Ketahanan ideologi diperlukan untuk menjaga arah dan identitas bangsa di tengah serbuan nilai-nilai asing dan arus globalisasi. Ketahanan sosial budaya membentuk dasar kohesi dan kepercayaan kolektif dalam masyarakat yang majemuk. Ketahanan ekonomi memberi kemampuan untuk mandiri dan tangguh dalam menghadapi gejolak pasar global. Ketahanan ekologi dan iklim memastikan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Ketahanan teknologi dan digital menjadi garis pertahanan baru di dunia maya yang kian menentukan. Sementara itu, ketahanan tata kelola pemerintahan adalah jantung dari keseluruhan sistem, yang menggerakkan semua pilar lain dengan arah, integritas, dan efisiensi.

Dalam perspektif ini, Ketahanan Nasional bukan sekadar instrumen bertahan (defensive instrument), tetapi menjadi motor transformasi bangsa (transformative engine). Bangsa yang resilien adalah bangsa yang bukan hanya mampu menyerap guncangan, tetapi juga menjadikannya sebagai momentum untuk tumbuh, berinovasi, dan menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, enam pilar ini harus dijalankan secara terintegrasi, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan tantangan aktual maupun potensi strategis Indonesia. Ketahanan seperti inilah yang akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk tidak sekadar bertahan di tengah badai perubahan global, tetapi untuk tampil sebagai pemimpin regional bahkan global dalam membangun peradaban baru yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Bab ini mengajak kita semua untuk tidak menunda rekonstruksi ketahanan, karena di sinilah kita sedang merancang fondasi sejarah bangsa untuk abad mendatang.

BAB 3

Rejuvenasi Lemhannas RI sebagai Motor Strategis Bangsa

Di tengah dinamika global yang ditandai oleh percepatan perubahan, ketidakpastian struktural, dan meningkatnya tantangan multidimensional, Indonesia membutuhkan institusi strategis yang mampu menjadi motor transformasi arah kebijakan kebangsaan. Lemhannas RI—Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia—memiliki posisi unik dan vital dalam ekosistem tata kelola negara. Dengan mandat langsung dari Presiden, Lemhannas berperan sebagai pusat pengkajian strategis dan pengkaderan kepemimpinan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan geopolitik.

Namun, konteks zaman telah berubah drastis sejak Lemhannas pertama kali dibentuk pada tahun 1965. Saat itu, orientasi utamanya adalah menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman ideologis dan konstelasi Perang Dingin. Kini, Indonesia menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks—mulai

dari krisis iklim, disrupsi teknologi, transformasi sosial digital, hingga tekanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, fungsi dan kapasitas Lemhannas RI perlu diremajakan secara menyeluruh agar tetap mampu menjadi garda terdepan dalam pembentukan visi strategis bangsa.

Rejuvenasi Lemhannas RI bukanlah sekadar perubahan kosmetik atau reorganisasi administratif, melainkan pembaruan mendalam yang mencakup tiga aspek utama: pertama, pembaruan visi dan misi institusi agar lebih adaptif terhadap tantangan abad ke-21; kedua, pembaruan metodologi dan kurikulum kaderisasi kepemimpinan nasional agar lebih futuristik, inklusif, dan kontekstual; ketiga, transformasi kapasitas kelembagaan sebagai think tank negara yang proaktif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan pemikiran strategis lintas-disiplin.

Dalam konteks ini, Lemhannas harus mampu bertransformasi menjadi inkubator kepemimpinan masa depan—yakni pemimpin yang tidak hanya cakap dalam memahami dinamika nasional dan global, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, etika publik, dan keberlanjutan. Selain itu, Lemhannas juga harus memperluas jejaring intelektual dan diplomatiknya, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, guna memperkuat kapasitasnya sebagai pusat gravitasi kebijakan strategis nasional.

Rejuvenasi Lemhannas RI adalah keniscayaan strategis dalam membangun ketahanan nasional berbasis kepemimpinan yang transformatif. Dalam dunia yang terus berubah, hanya bangsa yang memiliki institusi strategis yang dinamis dan visioner yang mampu bertahan dan memimpin. Oleh sebab itu, Lemhannas tidak hanya harus menjaga kesinambungan sejarahnya, tetapi juga menjadi lokomotif pembaruan peradaban Indonesia di abad ke-21.

A. Lemhannas RI dalam Sejarah dan Perkembangannya

Lemhannas RI merupakan salah satu institusi strategis yang dibentuk dengan visi jauh ke depan oleh para pendiri bangsa. Sejak diresmikan pada 20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno, Lemhannas RI telah menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, integritas kebangsaan, dan Wawasan Nusantara. Sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, Lemhannas berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan strategis negara dan pembangunan sumber daya kepemimpinan nasional yang visioner.

Sepanjang sejarahnya, Lemhannas RI telah memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan strategis di tengah berbagai gejolak politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Lembaga ini menjadi tempat penggodokan pemikiran strategis lintas sektor, sekaligus pusat pengkaderan pejabat tinggi sipil, militer, dan tokoh masyarakat yang diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan dan agen perubahan dalam sistem pemerintahan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi global, tantangan yang dihadapi Lemhannas juga mengalami pergeseran fundamental. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan internal agar Lemhannas tetap relevan dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas geopolitik, percepatan teknologi, dan perubahan demografi.

Beberapa tantangan internal utama yang perlu direspons secara progresif antara lain sebagai berikut. *Pertama*, kebutuhan pembaruan kurikulum yang mampu mencerminkan dinamika global saat ini, termasuk topik-topik seperti kecerdasan buatan, ketahanan digital, ekonomi hijau, dan kepemimpinan transformatif. *Kedua*, Integrasi pendekatan digital dalam proses pembelajaran dan riset strategis, agar Lemhannas tidak hanya menjadi pusat wacana, tetapi juga menjadi laboratorium intelektual berbasis data dan teknologi. *Ketiga*, penjangkauan terhadap kader muda dan pemimpin lokal, yang selama ini belum menjadi sasaran utama program, namun sangat penting

untuk memperluas basis kaderisasi kepemimpinan nasional yang inklusif dan beragam. *Keempat*, perluasan jejaring internasional, baik melalui kemitraan akademik, dialog strategis global, maupun diplomasi pemikiran (strategic thought diplomacy) untuk meningkatkan posisi Lemhannas sebagai mitra dialog setara di tingkat global.

Tantangan-tantangan ini menjadi alarm sekaligus peluang. Lemhannas tidak boleh terjebak dalam romantisme historis semata. Ia harus menjelma menjadi lembaga yang tidak hanya merefleksikan kejayaan masa lalu, tetapi juga merancang strategi masa depan bangsa dengan pendekatan yang lebih dinamis, adaptif, dan terbuka terhadap kolaborasi.

Sebagai penjaga sekaligus inovator nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI harus terus berkembang dan menegaskan eksistensinya sebagai lembaga strategis yang mampu memimpin diskursus nasional, membentuk pemimpin berkarakter, dan memberi arah kebijakan negara yang berpijak pada ketahanan nasional dan kepemimpinan berwawasan global.

B. Rejuvenasi Lemhannas: Dimensi Struktural dan Substansial

Lemhannas RI sebagai institusi strategis nasional harus terus berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ketidakpastian global, kompleksitas ancaman, dan percepatan transformasi sosial-politik, rejuvenasi Lemhannas menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Rejuvenasi ini tidak bersifat kosmetik atau parsial, melainkan bersifat menyeluruh—menjangkau aspek struktural kelembagaan hingga substansi pemikiran dan pelaksanaan program. Dalam kerangka ini, rejuvenasi Lemhannas RI mencakup dua dimensi utama: struktural dan substansial.

Dimensi Struktural: Reformasi Kelembagaan yang Responsif dan Terintegrasi

Rejuvenasi Lemhannas RI pada dimensi struktural merupakan landasan awal bagi transformasi kelembagaan yang lebih lincah,

adaptif, dan relevan dengan tantangan strategis abad ke-21. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh kompleksitas, kecepatan perubahan, dan saling keterhubungan antar sektor, Lemhannas perlu menata ulang fondasi kelembagaannya agar mampu berperan sebagai pusat gravitasi pemikiran strategis nasional. Transformasi struktural ini tidak hanya menyoal organisasi dalam arti formal, tetapi juga mencakup proses, teknologi, serta jejaring kemitraan yang menopang ekosistem kerja lembaga.

Pertama, reformasi kelembagaan harus dimulai dari modernisasi tata kelola organisasi. Lemhannas tidak bisa lagi terjebak dalam pola birokratis yang rigid dan lamban. Kelembagaan yang efektif di era ini menuntut desain organisasi yang fleksibel, dinamis, dan terbuka terhadap kolaborasi lintas disiplin dan sektor. Modernisasi ini mencakup penyederhanaan proses kerja, perbaikan sistem koordinasi internal, serta penerapan manajemen berbasis hasil (result-based management). Pemanfaatan sistem digital untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi program menjadi krusial dalam menciptakan alur kerja yang efisien dan terukur. Dengan tata kelola yang lebih tangkas, Lemhannas akan mampu merespons kebutuhan strategis bangsa dengan lebih cepat dan akurat.

Kedua, rejuvenasi struktural juga menyasar penguatan fungsi riset strategis. Sebagai lembaga think tank nasional, Lemhannas tidak cukup hanya menjadi pusat pelatihan kepemimpinan, tetapi harus tampil sebagai motor intelektual kebijakan negara. Untuk itu, riset strategis perlu ditingkatkan kualitas dan perannya. Lemhannas harus menjadi pelopor dalam pengembangan studi-studi strategis berbasis data, dengan pendekatan analitik yang memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan. Topik riset pun harus mencakup berbagai dimensi penting seperti geopolitik, teknologi digital, ekonomi-politik, hingga budaya dan identitas nasional. Hanya dengan riset yang kuat dan kredibel, Lemhannas dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan berdampak jangka panjang.

Ketiga, pembaruan struktural juga mencakup dorongan untuk memperluas kolaborasi lintas sektor. Lemhannas perlu membangun jaringan strategis yang luas dan beragam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama dengan universitas terkemuka, lembaga riset global, organisasi internasional, serta pelaku sektor swasta dapat memperkaya perspektif dan memperluas basis pengetahuan strategis lembaga. Kolaborasi ini bukan hanya bentuk diplomasi intelektual, tetapi juga instrumen penting untuk membangun sinergi kebangsaan dalam merespons tantangan global yang saling beririsan. Dalam konteks ini, Lemhannas diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemikiran domestik, tetapi juga mitra global dalam diskursus strategis yang lebih luas.

Keempat, dalam era revolusi industri 4.0 dan percepatan transformasi digital, pemanfaatan platform digital dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kebutuhan mendesak. Lemhannas harus mentransformasi diri menjadi pusat pengetahuan digital (digital knowledge hub) yang mampu memproduksi, mengelola, dan menyebarkan informasi strategis secara luas dan inklusif. Platform digital memungkinkan pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran dan publikasi, menjangkau audiens lebih luas, termasuk generasi muda. Lebih dari itu, integrasi teknologi AI dalam proses riset dan pemodelan strategis dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan deteksi dini terhadap potensi ancaman atau perubahan besar dalam lanskap global. Hal ini membuka ruang bagi Lemhannas untuk menjadi lembaga yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan visioner dalam menjawab dinamika zaman.

Melalui pembaruan struktural yang menyeluruh ini, Lemhannas RI dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga warisan nilai kebangsaan, tetapi juga sebagai arsitek masa depan bangsa. Kelembagaan yang modern, riset yang unggul, jejaring yang luas, serta teknologi yang canggih akan menjadi fondasi kokoh bagi Lemhannas dalam menjalankan mandat strategisnya: mencetak kepemimpinan nasional yang berpandangan jauh ke depan dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan.

Rejuvenasi struktural bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat utama menuju revitalisasi peran Lemhannas RI sebagai motor strategis bangsa di era baru yang penuh disrupsi dan kemungkinan.

Dimensi Substansial: Pembaruan Gagasan dan Transformasi Kepemimpinan

Transformasi Lemhannas RI tidak akan utuh tanpa menyentuh aspek substansial yang menyangkut inti dari misi lembaga ini: membentuk kepemimpinan nasional yang visioner, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dimensi substansial berkaitan dengan isi, pendekatan, dan orientasi strategis dari seluruh program yang dijalankan oleh Lemhannas, khususnya dalam pendidikan dan kaderisasi pemimpin nasional. Di tengah perubahan global yang semakin cepat dan dinamis, Lemhannas perlu menjadi pionir dalam merumuskan gagasan baru dan metode transformasional untuk membentuk pemimpin masa depan Indonesia.

Langkah *pertama* dalam pembaruan substansial ini adalah revisi kurikulum pendidikan kepemimpinan nasional. Kurikulum Lemhannas harus terus diperbarui agar selaras dengan isu-isu kontemporer yang bersifat lintas-sektoral dan multidimensi. Beberapa tema besar yang kini menjadi imperatif global harus terintegrasi secara mendalam, seperti perubahan iklim dan ketahanan lingkungan, transformasi digital dan kedaulatan data, keamanan dan pertahanan siber, serta dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, paradigma pembangunan juga harus mencerminkan transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru—dua pendekatan pembangunan berkelanjutan yang semakin mendapatkan tempat dalam perencanaan global. Dengan kurikulum yang progresif dan kontekstual, Lemhannas dapat mencetak pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga tanggap terhadap kerumitan tantangan nasional dan global.

Kedua, metode pembelajaran di Lemhannas juga harus mengalami transformasi. Pendekatan klasikal yang menempatkan peserta didik

sebagai objek penerima pengetahuan perlu digantikan dengan model pembelajaran interaktif dan partisipatif. Pembelajaran harus menjadi proses dialogis, berbasis studi kasus, diskusi kelompok, dan kolaborasi multipihak. Lemhannas dapat mengadopsi sistem pembelajaran hibrida yang memadukan pembelajaran daring (online) dan luring (offline), memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan memperkaya pengalaman belajar. Pengundangan narasumber dari dalam dan luar negeri, termasuk praktisi dan akademisi global, akan memperkaya perspektif serta membangun jejaring strategis peserta didik di panggung internasional. Dengan pendekatan ini, Lemhannas akan menciptakan ruang pembelajaran yang reflektif, dinamis, dan relevan.

Ketiga, dimensi substansial rejuvenasi Lemhannas harus mencakup inklusi generasi muda dan kepemimpinan perempuan. Di tengah transisi demografi dan meningkatnya peran perempuan dalam ruang publik, Lemhannas perlu membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan generasi baru. Keterlibatan pemimpin muda daerah, inovator sosial, aktivis lingkungan, serta profesional dari sektor strategis seperti teknologi dan energi akan memperluas cakrawala kepemimpinan nasional. Selain itu, peningkatan peran perempuan dalam program-program strategis Lemhannas tidak hanya sebagai representasi gender, tetapi sebagai pengakuan atas kapasitas kepemimpinan perempuan yang terus berkembang. Inklusi ini bukan hanya soal keadilan sosial, melainkan bagian integral dari strategi ketahanan nasional yang berbasis keberagaman.

Keempat, substansi rejuvenasi juga harus menyentuh aspek paling mendasar: reorientasi visi dan misi strategis Lemhannas. Lembaga ini harus melampaui paradigma lama yang sekadar mencetak pemimpin administratif atau teknokratik. Lemhannas harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan pemimpin strategis—mereka yang mampu berpikir lintas batas sektor, membaca dinamika masa depan, dan merumuskan solusi dengan visi kebangsaan yang kuat. Pemimpin yang dibentuk bukan

sekadar pengelola sistem, tetapi juga pembaru yang mampu membayangkan masa depan dan membawa Indonesia ke arah yang lebih berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Lemhannas RI dapat memainkan peran sebagai pusat gravitasi baru bagi transformasi kepemimpinan bangsa. Dengan substansi pembelajaran yang mutakhir, pendekatan yang transformatif, serta inklusi peserta yang mewakili keragaman Indonesia, Lemhannas akan semakin relevan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Rejuvenasi substansial ini menjadi kunci agar Lemhannas tidak hanya menjadi pewaris masa lalu, tetapi juga perancang masa depan yang strategis dan transformatif.

Membangun Lemhannas Masa Depan

Rejuvenasi Lemhannas RI merupakan langkah penting dalam menjadikan lembaga ini sebagai motor strategis bangsa di tengah era transformasi. Dimensi struktural memberikan fondasi organisasi yang efisien dan adaptif, sedangkan dimensi substansial memastikan relevansi dan kebermaknaan misi kepemimpinan nasional. Keduanya tidak dapat dipisahkan—struktur yang baik tanpa substansi hanya akan menghasilkan rutinitas; substansi yang baik tanpa struktur hanya akan menjadi wacana.

Lemhannas RI harus terus bergerak menuju lembaga yang mampu membaca tanda-tanda zaman, menavigasi arah kebijakan strategis negara, dan mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang siap menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Inilah saatnya Lemhannas RI berevolusi dari lembaga pelatihan klasik menjadi "*strategic foresight institution*"—penjaga nilai dan penjuru arah Indonesia Emas 2045.

C. Lemhannas sebagai 'Think Tank' Strategis Negara

Di tengah era disrupsi informasi, percepatan teknologi, dan kompleksitas geopolitik global, negara memerlukan institusi yang mampu menyediakan pijakan pemikiran strategis yang tidak hanya

reaktif terhadap kejadian, tetapi juga proaktif dalam membaca arah masa depan. Dalam konteks ini, Lemhannas RI memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjalankan peran sebagai *think tank* utama negara—sebuah pusat kecerdasan strategis yang menjadi tulang punggung dalam perumusan kebijakan nasional berbasis wawasan jangka panjang, data akurat, dan analisis multidimensi.

Peran *think tank* yang efektif tidak hanya terletak pada kemampuan intelektual semata, melainkan juga pada kapabilitas untuk melakukan *foresight* dan *horizon scanning*—mendeteksi tren, ancaman, dan peluang yang muncul di cakrawala strategis nasional maupun global. Lemhannas perlu berevolusi dari lembaga kaderisasi semata menjadi *strategic nerve center* yang menyuplai arus informasi terverifikasi dan rekomendasi kebijakan yang berbobot, netral, dan transformatif.

Langkah *pertama* dalam penguatan fungsi ini adalah pembangunan platform riset strategis digital nasional. Platform ini harus menjadi simpul dari berbagai sumber data nasional dan internasional, serta mampu mengintegrasikan tren geopolitik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Melalui pengembangan sistem analitik berbasis kecerdasan buatan dan big data, Lemhannas akan mampu memproses informasi dalam skala besar secara efisien, menghasilkan *insight* yang tajam dan aplikatif bagi para pengambil kebijakan.

Kedua, Lemhannas perlu mengembangkan jaringan peneliti dan analis strategis muda dari seluruh Indonesia. Regenerasi pemikir strategis sangat penting agar lembaga ini tidak hanya menjadi tempat reproduksi gagasan konvensional, tetapi juga ruang tumbuh bagi inovasi strategis baru yang relevan dengan generasi masa depan. Program *fellowship*, kolaborasi riset, dan laboratorium kebijakan berbasis universitas dapat menjadi wahana memperluas jejaring intelektual Lemhannas secara nasional maupun global.

Ketiga, Lemhannas perlu menyusun dashboard ketahanan nasional berbasis indikator multidimensi. Dashboard ini tidak hanya menjadi alat ukur ketahanan dalam arti konvensional, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai kerentanan—dari instabilitas sosial, tekanan ekonomi, hingga ancaman non-tradisional seperti cyberwar dan bencana ekologis. Dengan pendekatan ini, Lemhannas menjadi pusat monitoring strategis yang relevan bagi seluruh sektor pemerintahan.

Akhirnya, Lemhannas harus mengambil posisi sebagai mitra utama pemerintah dalam perumusan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan reputasi intelektual yang kuat, independensi analitik, serta jejaring global yang kokoh, Lemhannas dapat menjadi aktor epistemik yang memandu arah kebijakan nasional secara holistik dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Lemhannas RI dapat menjalankan perannya sebagai *think tank* strategis negara yang tidak hanya mengingatkan, tetapi juga menerangi jalan menuju Indonesia yang tangguh, adil, dan berdaya saing di panggung dunia.

D. Mendorong Kepemimpinan Nasional yang Visioner

Di tengah transformasi global yang ditandai dengan disrupsi teknologi, pergeseran geopolitik, dan krisis multidimensi, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan nasional yang visioner. Lemhannas RI, sebagai institusi strategis negara, memiliki mandat fundamental untuk membina dan mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang tidak hanya memahami sejarah dan nilai-nilai dasar negara, tetapi juga mampu mengantisipasi masa depan dengan gagasan dan tindakan transformatif.

Rejuvenasi Lemhannas RI mengharuskan redefinisi terhadap konsep kepemimpinan. Pembinaan tidak lagi bisa didasarkan hanya pada senioritas, rekam jejak administratif, atau pengalaman birokratis semata. Dalam konteks baru, kepemimpinan nasional

harus dibentuk melalui pendekatan holistik yang menekankan *future literacy*—kemampuan untuk membaca arah zaman, memetakan risiko, serta merancang solusi sistemik dengan keberanian mengambil keputusan strategis.

Kepemimpinan masa depan Indonesia akan ditentukan oleh empat fondasi utama. *Pertama*, kemampuan membaca tren global dan lokal secara simultan. Seorang pemimpin tidak boleh terjebak dalam horizon sektoral atau nasional semata, melainkan harus mampu memahami bagaimana dinamika global—seperti perubahan iklim, geopolitik Indo-Pasifik, krisis pangan dan energi—akan memengaruhi kebijakan domestik dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, kompetensi digital dan keberanian mengambil risiko strategis. Pemimpin yang visioner bukanlah mereka yang hanya menjaga status quo, tetapi yang berani mengambil keputusan sulit demi melindungi kepentingan nasional jangka panjang. Di era data dan kecerdasan buatan, literasi teknologi menjadi keharusan, agar pemimpin tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi aktor yang mampu memanfaatkan teknologi untuk transformasi kebijakan.

Ketiga, kemampuan membangun kepercayaan publik melalui integritas dan komunikasi strategis. Kepemimpinan yang kuat dibangun di atas fondasi kepercayaan rakyat. Untuk itu, Lemhannas perlu menanamkan nilai-nilai kepemimpinan etis, akuntabel, dan komunikatif dalam setiap program pembinaannya. Seorang pemimpin visioner harus mampu menyampaikan arah kebijakan dengan narasi yang menginspirasi, inklusif, dan menyatukan perbedaan.

Keempat, komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan. Dalam konteks Indonesia yang plural, kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya memerintah, tetapi juga dalam menjaga harmoni

sosial, menjunjung tinggi keadilan, dan menguatkan semangat persatuan di tengah keberagaman identitas.

Untuk itu, Lemhannas RI perlu menjadi katalisator pembinaan kepemimpinan lintas sektor, lintas usia, dan lintas wilayah. Artinya, kepemimpinan nasional tidak boleh didominasi satu kelompok elite semata. Lemhannas harus membuka ruang lebih luas bagi pemimpin daerah, profesional muda, perempuan, serta aktor non-pemerintah yang memiliki kapasitas dan integritas. Dengan pendekatan ini, Lemhannas dapat memperluas ekosistem kepemimpinan nasional yang representatif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan Indonesia secara kolektif.

E. Jejaring Global dan Diplomasi Strategis

Di tengah meningkatnya dinamika dan ketegangan geopolitik dunia, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, letak strategis, serta komitmen pada tatanan dunia yang damai dan berkeadilan semakin mendapat perhatian. Dalam konteks ini, Lemhannas RI memiliki potensi dan tanggung jawab yang besar untuk menjadi aktor penting dalam diplomasi strategis berbasis pengetahuan (*knowledge-based diplomacy*). Peran ini merupakan bagian integral dari upaya memperluas jejaring global dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik internasional.

Lemhannas RI tidak cukup hanya berperan sebagai lembaga domestik pembina kepemimpinan nasional. Dalam era saling ketergantungan dan arsitektur global yang makin kompleks, Lemhannas perlu tampil sebagai duta pemikiran strategis Indonesia di kancah internasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menjalin dan memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga *think tank* terkemuka di dunia, seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Amerika Serikat, The Valdai Discussion Club di Rusia, Chatham House di Inggris, National Institute for Defense Studies (NIDS) di Jepang, dan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura.

Kerja sama tersebut bukan hanya bersifat seremonial atau formalitas, tetapi harus diarahkan pada pertukaran pemikiran strategis, kolaborasi dalam riset kebijakan, serta penyelenggaraan forum-forum internasional yang membahas isu-isu global dari sudut pandang Indonesia dan kawasan. Melalui interaksi semacam ini, Lemhannas dapat menjadi corong utama gagasan-gagasan strategis Indonesia di level internasional, sekaligus memperkuat landasan diplomasi luar negeri berbasis intelektual dan nilai-nilai Pancasila.

Lebih dari itu, membangun jejaring global juga berfungsi untuk konsolidasi posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan Indo-Pasifik, mulai dari dinamika kekuatan besar, ketegangan Laut Cina Selatan, hingga ketahanan maritim dan konektivitas antarnegara. Lemhannas dapat memainkan peran penting dalam merumuskan pendekatan Indonesia yang independen, damai, dan kolaboratif di kawasan tersebut—sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Jejaring global ini juga penting untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Lemhannas. Program pertukaran peneliti, pelatihan bersama, dan kolaborasi riset internasional akan memperkaya wawasan dan memperkuat kualitas kader strategis Lemhannas. Dengan demikian, SDM Lemhannas dapat tampil setara dalam perdebatan global dan menjadi agen penyampai kepentingan nasional dalam forum-forum internasional yang strategis.

Akhirnya, Lemhannas harus diposisikan sebagai wajah intelektual Indonesia di panggung global—institusi yang tidak hanya merefleksikan kekuatan nasional, tetapi juga menawarkan solusi, nilai, dan model pembangunan yang berakar pada Pancasila dan semangat kemanusiaan. Melalui diplomasi strategis berbasis pengetahuan, Lemhannas berperan sebagai penjembatan antara pemikiran nasional dan arah masa depan dunia yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

F. Kesimpulan

Rejuvenasi Lemhannas RI bukan sekadar proyek administratif atau reformasi kelembagaan biasa, melainkan sebuah agenda kebangsaan yang strategis dan mendesak. Di tengah arus perubahan global yang bergerak sangat cepat dan penuh ketidakpastian, hanya lembaga yang mampu memperbarui diri secara menyeluruh yang dapat mempertahankan relevansi dan peran strategisnya. Lemhannas, dengan sejarah panjang dan warisan besar sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, harus berani membuka diri terhadap inovasi, pembaruan, serta kolaborasi lintas sektoral dan internasional agar tetap menjadi motor penggerak bangsa.

Bab ini menegaskan bahwa rejuvenasi Lemhannas RI adalah keniscayaan strategis untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Pembaruan ini tidak hanya berfokus pada aspek struktural organisasi, melainkan juga pada dimensi substansial, yang menyangkut pembaruan gagasan, metode kepemimpinan, serta visi strategis yang dibangun dalam proses pembinaan kader nasional.

Lemhannas harus mampu menjalankan tiga fungsi utama secara simultan agar tetap menjadi pilar ketahanan nasional yang efektif dan responsif terhadap dinamika zaman. *Pertama*, sebagai lembaga kaderisasi kepemimpinan nasional yang relevan dan progresif. Lemhannas harus melahirkan pemimpin-pemimpin visioner, inklusif, dan adaptif yang mampu menjawab kompleksitas tantangan domestik dan global, mulai dari perubahan iklim, transformasi digital, hingga geopolitik Indo-Pasifik.

Kedua, Lemhannas harus berperan sebagai think tank strategis negara yang modern, yang tidak hanya reaktif terhadap isu-isu kebangsaan, tetapi juga mampu melakukan analisis berbasis data, foresight, dan horizon scanning secara sistematis. Dengan penguatan riset strategis yang berbasis teknologi dan kolaborasi multi-disiplin, Lemhannas dapat menjadi sumber rekomendasi

kebijakan yang kredibel dan inovatif, mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara tepat dan berorientasi masa depan.

Ketiga, sebagai aktor diplomasi strategis Indonesia di panggung global, Lemhannas harus memperkuat jejaring dan kerja sama dengan institusi riset dan think tank internasional terkemuka. Diplomasi berbasis pengetahuan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional, terutama dalam isu-isu strategis kawasan Indo-Pasifik, stabilitas global, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui peran ini, Lemhannas juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusianya agar mampu bersaing dan berpartisipasi aktif dalam forum internasional.

Keseluruhan proses rejuvenasi ini menjadi modal penting bagi Lemhannas untuk terus menjadi benteng terakhir nilai-nilai kebangsaan, sekaligus sebagai perumus arah masa depan Indonesia yang lebih tangguh, berkeadilan, dan maju. Lemhannas harus mampu menjaga warisan luhur sekaligus berinovasi untuk membangun bangsa yang siap menghadapi tantangan global dan menjawab harapan rakyat akan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Dengan semangat pembaruan yang holistik—meliputi aspek kelembagaan, substantif, serta jejaring strategis—Lemhannas akan tetap kokoh sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Rejuvenasi ini menjadi kunci agar Lemhannas tidak hanya berfungsi sebagai institusi masa lalu, tetapi sebagai pusat penggerak perubahan dan inovasi strategis yang menyokong visi Indonesia Maju dalam abad ke-21 dan seterusnya.

BAB 4

Inovasi Berkelanjutan sebagai Inti Ketahanan Nasional

Di tengah arus globalisasi dan revolusi teknologi yang terus berakselerasi, inovasi telah menjadi elemen vital yang menentukan posisi suatu bangsa dalam tatanan dunia. Ketahanan Nasional—yang selama ini sering diidentikkan dengan aspek pertahanan dan keamanan konvensional—kini harus didefinisikan ulang dalam konteks yang lebih dinamis. Ketahanan bukan hanya kemampuan bertahan dari ancaman eksternal, melainkan juga kemampuan internal untuk terus beradaptasi, memperbarui diri, dan melahirkan solusi atas tantangan baru. Dalam kerangka ini, inovasi berkelanjutan menjadi inti dari Ketahanan Nasional yang tangguh dan progresif.

Inovasi adalah kunci bagi sebuah bangsa untuk tetap relevan, mandiri, dan kompetitif. Negara-negara yang mampu menghasilkan inovasi secara berkelanjutan akan lebih siap menghadapi guncangan eksternal, seperti krisis ekonomi,

pandemi, konflik geopolitik, hingga bencana iklim. Inovasi memungkinkan transformasi menyeluruh—baik dalam kebijakan publik, tata kelola, sistem pendidikan, pertahanan digital, hingga pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, menjadikan inovasi sebagai fondasi Ketahanan Nasional berarti membangun ekosistem yang mendukung kreativitas, eksperimen, dan pembaruan. Hal ini mencakup berbagai dimensi: regulasi yang pro-inovasi, sistem pendidikan yang menumbuhkan critical thinking dan problem solving, investasi yang diarahkan pada riset dan pengembangan (R&D), serta insentif bagi sektor swasta dan start-up teknologi untuk menjadi motor pertumbuhan. Pemerintah harus menciptakan ruang yang cukup bagi tumbuhnya gagasan-gagasan baru, sembari melindungi kepentingan nasional dalam kerangka kedaulatan inovasi.

Lebih jauh, inovasi tidak hanya mencakup aspek teknologi, tetapi juga inovasi sosial, budaya, dan kelembagaan. Inovasi dalam model kepemimpinan, pola interaksi masyarakat, serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis data dan partisipasi publik adalah bagian integral dari regenerasi nasional. Lemhannas RI, sebagai pusat pembentukan kader strategis nasional, memiliki peran penting dalam menanamkan semangat inovatif di kalangan pemimpin bangsa. Melalui pembaruan kurikulum, metode belajar kolaboratif, serta jejaring strategis nasional dan internasional, Lemhannas dapat menjadi inkubator inovasi kebangsaan.

Inovasi juga memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Konsep ekonomi hijau dan biru, pengembangan energi terbarukan, serta perlindungan sumber daya alam berbasis teknologi mutakhir merupakan manifestasi langsung dari ketahanan berwawasan lingkungan. Semua ini menggarisbawahi bahwa ketahanan sejati tidak dapat dibangun dengan pendekatan reaktif semata, tetapi harus dipupuk melalui pemikiran strategis yang inovatif dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, menempatkan inovasi sebagai inti dari Ketahanan Nasional bukan hanya pilihan rasional, tetapi keharusan historis. Inovasi berkelanjutan adalah cara bangsa ini bertahan, berkembang, dan memimpin di tengah dunia yang terus berubah. Ia adalah napas dari Ketahanan Nasional Indonesia masa depan—napas yang memberi kehidupan, harapan, dan arah menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan maju.

A. Inovasi dan Resiliensi: Dua Sisi Satu Koin

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan tidak terduga, inovasi dan resiliensi tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan elemen fundamental yang saling menopang dan memperkuat. Ketahanan nasional yang sejati bukan hanya tentang bertahan dari guncangan eksternal, tetapi juga tentang kemampuan untuk terus berkembang dan menemukan solusi baru secara berkelanjutan. Di sinilah peran inovasi menjadi sangat penting: sebagai kekuatan dinamis yang mendorong bangsa untuk keluar dari krisis dan bergerak maju dengan arah yang lebih jelas dan visioner.

Ketahanan tanpa inovasi akan menjadikan sistem nasional kaku, lamban, dan rentan terhadap perubahan. Ia hanya mampu bertahan sementara, tetapi gagal menjawab kebutuhan masa depan. Di sisi lain, inovasi tanpa fondasi resiliensi berisiko menciptakan instabilitas dan fragmentasi. Gagasan dan teknologi baru yang tidak ditopang oleh sistem yang kokoh dan berdaya lenting akan cepat runtuh dalam tekanan politik, sosial, atau ekonomi. Oleh karena itu, membangun ekosistem inovasi yang berpijak pada prinsip resiliensi adalah keharusan strategis.

Ekosistem inovasi nasional yang tangguh harus dirancang secara sistemik dan berorientasi jangka panjang. *Pertama*, penguatan riset dan pengembangan (R&D) perlu diarahkan pada isu-isu strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, pertahanan digital, hingga pengelolaan risiko bencana

dan perubahan iklim. R&D harus menjadi tulang punggung kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, bukan sekadar pelengkap administratif.

Kedua, kebijakan publik harus bersifat pro-inovasi. Ini mencakup reformasi regulasi yang mendorong kreativitas, penyederhanaan birokrasi, serta pemberian insentif kepada sektor swasta dan pelaku inovasi independen. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang aman dan terbuka bagi eksperimen dan pengembangan solusi baru.

Ketiga, investasi dalam pendidikan dan pengembangan talenta digital menjadi sangat krusial. Pendidikan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan adaptif adalah fondasi dari generasi inovatif. Indonesia membutuhkan SDM yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki keberanian untuk menantang status quo dan menciptakan terobosan.

Keempat, kolaborasi antarsektor harus menjadi norma baru. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membangun aliansi strategis untuk mengatasi tantangan bersama. Pendekatan pentahelix ini memungkinkan pertukaran ide, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan percepatan proses inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terakhir, yang tak kalah penting adalah membangun budaya nasional yang menghargai pembaruan, kreativitas, dan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tanpa budaya inovatif, semua upaya kelembagaan akan menemui batas.

Dengan ekosistem seperti ini, inovasi dan resiliensi benar-benar menjadi dua sisi dari satu koin yang sama—koin yang akan menjadi mata uang utama bagi masa depan Ketahanan Nasional Indonesia.

B. Ketahanan Nasional dalam Era Digital

Kita tengah berada dalam era baru peradaban—era digital—yang ditandai dengan revolusi teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, dan konektivitas tanpa batas. Dalam konteks ini, ketahanan nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola dan menguasai teknologi digital sebagai aset strategis. Data telah menjadi kekayaan baru, dan siapa yang menguasainya, menguasai arah masa depan bangsa.

Negara-negara maju saat ini menempatkan transformasi digital sebagai prioritas tertinggi dalam kebijakan nasional. Digitalisasi telah menjadi alat untuk memperkuat pertahanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membenahi birokrasi, serta memperluas akses pendidikan dan layanan publik. Dalam konteks Ketahanan Nasional, Indonesia harus menjadikan transformasi digital bukan sekadar proyek teknologi, tetapi sebagai bagian dari strategi besar untuk membangun kekuatan nasional yang adaptif dan berkelanjutan.

Transformasi digital dalam kerangka ketahanan nasional memiliki beberapa orientasi utama. Pertama, meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik melalui digitalisasi sistem pemerintahan. Ini bukan hanya soal e-government, tetapi menciptakan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Ketahanan suatu negara sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan respons birokrasi terhadap dinamika zaman.

Kedua, digitalisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi dan industri. Pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Industri kecil dan menengah harus diberi akses terhadap teknologi ini agar dapat bersaing di pasar global dan memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput.

Ketiga, kedaulatan data dan keamanan siber menjadi aspek vital yang harus dijaga. Serangan siber, manipulasi informasi, dan eksploitasi data pribadi telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun sistem keamanan digital nasional yang tangguh, termasuk arsitektur data yang mandiri dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber.

Keempat, memperkuat literasi digital masyarakat menjadi fondasi utama. Ketahanan digital tidak hanya soal perangkat dan sistem, tetapi juga kesiapan warga negara dalam memahami, memanfaatkan, dan melindungi diri dari risiko dunia digital. Literasi ini mencakup pemahaman atas etika digital, keamanan data pribadi, hingga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar.

Dalam konteks ini, **Lemhannas RI** memiliki peran strategis sebagai katalisator pemikiran dan penguatan kapasitas kepemimpinan nasional. Lemhannas harus menjadi pelopor dalam merumuskan pendekatan strategis terhadap transformasi digital—tidak hanya dari sisi teknologinya, tetapi juga dari implikasi geopolitik, kedaulatan, dan keberlanjutan sosial-politik bangsa.

Dengan menjadikan transformasi digital sebagai pilar Ketahanan Nasional, Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah arus globalisasi digital, tetapi juga dapat memimpin dan membentuk tatanan dunia baru yang lebih adil dan berdaulat berbasis nilai-nilai Pancasila.

C. Green Innovation dan Ketahanan Ekologis

Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan—ia adalah kenyataan hari ini yang mengancam keberlanjutan hidup manusia, kestabilan geopolitik, dan fondasi ekonomi global. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas dan sumber daya alam yang luar biasa berada di garis depan dari dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, ketahanan nasional

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketahanan ekologis. Di sinilah **green innovation** atau inovasi hijau menjadi pilar penting dalam agenda strategis bangsa.

Inovasi hijau bukan sekadar upaya mengurangi emisi karbon atau menghemat energi. Lebih dari itu, ia merupakan pendekatan sistemik untuk mengubah cara hidup, cara memproduksi, dan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam konteks Ketahanan Nasional, green innovation adalah investasi jangka panjang dalam menjaga kelangsungan kehidupan dan stabilitas negara di tengah krisis ekologis global.

Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk memimpin dalam inovasi hijau. Dari segi sumber daya, negeri ini kaya akan energi terbarukan—matahari yang bersinar sepanjang tahun, angin di wilayah pesisir, arus sungai dan ombak laut, serta biomassa dari hutan dan pertanian. Potensi ini belum dimobilisasi secara maksimal sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Pengembangan energi terbarukan bukan hanya soal diversifikasi energi, tetapi juga upaya untuk mencapai kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Selain itu, sektor pertanian Indonesia menyimpan peluang besar untuk bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan. Penggunaan teknologi pertanian presisi, pupuk organik, dan sistem irigasi hemat air adalah contoh konkret green innovation di sektor pangan. Jika dikelola dengan tepat, pertanian berkelanjutan dapat menjadi sumber ketahanan pangan yang andal sekaligus menjaga kualitas tanah dan air untuk generasi mendatang.

Sektor ekonomi biru atau kelautan juga harus mendapat perhatian. Indonesia sebagai negara maritim memiliki ruang luas untuk mengembangkan ekowisata, budidaya laut berkelanjutan, serta pengelolaan pesisir yang ramah lingkungan. Inovasi di bidang

ini akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah pesisir sekaligus menjaga ekosistem laut yang vital bagi perubahan iklim global.

Dalam semua sektor ini, peran kebijakan publik sangat penting. Pemerintah harus menciptakan insentif fiskal dan regulasi yang mendorong adopsi teknologi hijau, sekaligus membangun infrastruktur pendukung yang merata di seluruh wilayah. Pendidikan dan pelatihan juga harus diarahkan untuk mencetak talenta hijau—generasi pemimpin dan profesional yang memiliki kesadaran ekologis tinggi.

Lemhannas RI memiliki peran strategis dalam membentuk kerangka berpikir pemimpin masa depan yang memahami keterkaitan antara lingkungan, inovasi, dan ketahanan nasional. Dengan menempatkan green innovation sebagai bagian dari agenda strategis nasional, Indonesia dapat membangun masa depan yang tangguh, adil, dan selaras dengan alam.

D. Inovasi Sosial sebagai Pilar Ketangguhan Masyarakat

Ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari atas melalui kebijakan negara, tetapi juga dari bawah—melalui ketangguhan masyarakat dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Di sinilah peran inovasi sosial menjadi sangat strategis. Berbeda dari inovasi teknologi yang kerap berfokus pada mesin, algoritma, atau produk, inovasi sosial menyentuh langsung struktur kehidupan sosial masyarakat: nilai, interaksi, organisasi, dan cara-cara baru dalam menyelesaikan persoalan kolektif.

Inovasi sosial adalah bentuk kreativitas masyarakat dalam merespons persoalan lokal dengan solusi yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Ketahanan Nasional, inovasi sosial berfungsi sebagai penguat jaringan sosial (social fabric), menciptakan daya lenting (resilience) yang tidak tergantung pada intervensi eksternal, dan membangun solidaritas antarkomunitas yang menjadi benteng pertama menghadapi krisis, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia.

Berbagai contoh inovasi sosial telah muncul di banyak wilayah Indonesia. Misalnya, koperasi digital dan inklusi keuangan berbasis komunitas yang menjawab kebutuhan akses modal bagi masyarakat yang tidak terjangkau sistem perbankan konvensional. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kontrol masyarakat atas sumber dayanya sendiri.

Contoh lain adalah platform pembelajaran daring terbuka di daerah terpencil, yang dikembangkan oleh komunitas lokal, guru, dan relawan untuk menjawab keterbatasan akses pendidikan formal. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, inovasi ini turut mengatasi kesenjangan pendidikan dan memperkuat fondasi intelektual generasi muda di wilayah tertinggal.

Dalam konteks penanggulangan bencana, masyarakat Indonesia telah membuktikan kekuatannya melalui skema gotong royong yang terus berevolusi. Misalnya, penggunaan teknologi sederhana untuk koordinasi bantuan, relawan digital, serta penyimpanan logistik komunitas adalah bentuk nyata inovasi sosial yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi respon lokal terhadap krisis.

Tak kalah penting, model partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan lokal, seperti musyawarah desa digital atau forum warga daring, menunjukkan bahwa inovasi sosial juga dapat memperkuat demokrasi partisipatif. Dengan memberi ruang bagi suara warga, terutama kelompok rentan, inovasi semacam ini membangun kepercayaan terhadap institusi dan memperkuat kohesi sosial.

Lemhannas RI perlu menempatkan inovasi sosial sebagai komponen integral dalam kerangka Ketahanan Nasional. Pemimpin strategis masa depan harus memahami bahwa kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada sumber daya ekonomi atau militer, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk saling merawat, beradaptasi, dan berinovasi secara sosial. Dengan mendorong dan mengarusutamakan

inovasi sosial, Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang tangguh, tetapi juga adil, inklusif, dan berdaya dari akar rumput.

E. Peran Lemhannas dalam Mendorong Ekosistem Inovatif

Dalam menghadapi tantangan abad ke-21, inovasi telah menjadi elemen kunci bagi ketahanan dan kemajuan bangsa. Negara yang mampu membangun dan mengelola ekosistem inovasi dengan baik akan memiliki daya saing dan daya lenting tinggi terhadap berbagai disrupsi, baik di bidang ekonomi, sosial, geopolitik, maupun lingkungan. Sebagai lembaga strategis negara, Lemhannas RI memegang peran sentral dalam membentuk kerangka pikir, strategi, dan kepemimpinan nasional yang berpihak pada inovasi sebagai fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rejuvenasi Lemhannas harus diarahkan tidak hanya pada pembaruan struktural dan kurikulum, tetapi juga pada penanaman orientasi inovatif dalam seluruh aspek kelembagaan. Lemhannas dapat menjadi pelopor dalam mempromosikan agenda inovasi sebagai bagian integral dari pendidikan kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, inovasi tidak hanya dipandang sebagai urusan teknologi, tetapi sebagai pendekatan berpikir yang menyeluruh—berani mengevaluasi status quo, mencari solusi alternatif, dan membangun sistem yang lebih adaptif dan tangguh.

Lemhannas juga memiliki potensi besar untuk membentuk laboratorium strategi kebijakan yang berbasis skenario, data besar (big data), dan teknologi analitik. Laboratorium ini dapat digunakan untuk menguji berbagai kemungkinan masa depan (foresight) dan mempersiapkan respon kebijakan yang tepat terhadap tantangan kompleks. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dan berbasis bukti yang kuat.

Lebih jauh, Lemhannas dapat memainkan peran sebagai penghubung strategis antara pembuat kebijakan dan pelaku inovasi di berbagai sektor—baik dari kalangan industri, komunitas riset, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dengan mengadakan

forum-dialog, inkubasi gagasan kebijakan, dan platform kolaborasi lintas sektor, Lemhannas bisa mempertemukan pemikiran strategis dengan praktik inovatif secara konkret.

Dalam konteks pengembangan SDM, Lemhannas juga dapat menyediakan pelatihan khusus tentang kepemimpinan inovatif, manajemen perubahan, dan pemanfaatan teknologi baru untuk pengambil keputusan di semua level. Hal ini akan memperkuat kapasitas negara dalam menghasilkan pemimpin yang visioner, kreatif, dan mampu membangun transformasi sistemik.

Tidak kalah penting, Lemhannas perlu membangun dan memperluas jejaring global dan regional dalam isu-isu inovasi strategis. Melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga inovasi internasional, Lemhannas dapat memperkaya wawasannya dan sekaligus menjadi jembatan diplomasi pengetahuan bagi Indonesia.

Dengan seluruh peran tersebut, Lemhannas RI dapat melampaui fungsi tradisionalnya sebagai think tank dan menjelma menjadi "action tank"—sebuah pusat gravitasi kebijakan inovasi nasional yang tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mendorong eksekusi dan implementasi kebijakan inovatif di berbagai sektor kehidupan nasional.

F. Membangun Budaya Inovatif Nasional

Inovasi tidak tumbuh di ruang hampa. Ia berkembang dalam lingkungan yang mendukung keberanian untuk berpikir berbeda, mencoba hal baru, dan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, membangun budaya inovatif merupakan elemen fundamental dari strategi Ketahanan Nasional jangka panjang. Budaya inovatif bukan hanya soal teknologi, melainkan sikap mental kolektif suatu bangsa yang menghargai kreativitas, terbuka pada pembaruan, dan siap beradaptasi di tengah perubahan.

Di tengah arus disrupsi global, bangsa yang tidak memiliki budaya inovatif akan mudah terjebak dalam stagnasi dan ketergantungan.

Sebaliknya, bangsa yang memiliki kultur inovasi akan lebih tangguh menghadapi ketidakpastian karena mampu menciptakan solusi-solusi baru dari dalam dirinya sendiri. Budaya ini menjadi daya dorong internal yang memampukan masyarakat untuk terus belajar, bereksperimen, dan berkontribusi terhadap perubahan positif.

Ada beberapa prasyarat penting dalam membangun budaya inovatif nasional. *Pertama*, toleransi terhadap kegagalan harus dijadikan bagian dari sistem sosial dan kebijakan publik. Gagal bukanlah akhir, melainkan awal dari pembelajaran dan perbaikan. *Kedua*, penghargaan terhadap kreativitas dan solusi lokal harus diperkuat. Tidak semua inovasi datang dari pusat; banyak solusi inovatif lahir dari komunitas akar rumput yang memahami persoalan lokal secara mendalam. *Ketiga*, pembelajaran sepanjang hayat perlu dijadikan norma sosial di semua lapisan masyarakat. Inovasi akan mandek jika masyarakat berhenti belajar. *Keempat*, dan yang tak kalah penting, dibutuhkan kepemimpinan yang memberi ruang bagi eksperimentasi, mendukung gagasan baru, dan berani mengambil risiko strategis demi kepentingan yang lebih besar.

Dalam konteks ini, Lemhannas RI memiliki peran strategis sebagai institusi pembentuk pemimpin nasional. Rejuvenasi Lemhannas harus diarahkan untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual dan teknokratis, tetapi juga memiliki etos inovasi—yakni keberanian untuk berpikir ke depan, mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan progresif. Kepemimpinan semacam ini sangat dibutuhkan untuk membentuk ekosistem nasional yang mendukung inovasi secara sistemik.

Lebih lanjut, Lemhannas dapat menjadi penggerak perubahan budaya di tingkat elit birokrasi dan pemerintahan dengan mengintegrasikan nilai-nilai inovasi dalam setiap modul pendidikan dan pelatihannya. Melalui narasi strategis, simulasi kebijakan, dan studi kasus nyata, peserta didik di Lemhannas

akan terbentuk tidak hanya sebagai administrator, tetapi sebagai transformator yang membawa semangat pembaruan ke dalam lembaga masing-masing.

Membangun budaya inovatif nasional adalah proyek lintas generasi. Namun proses ini harus dimulai dari sekarang, dan Lemhannas dapat menjadi lokomotifnya. Dengan menanamkan budaya inovasi dalam kepemimpinan nasional, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memastikan keberlanjutan ketahanan bangsanya.

G. Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa inovasi bukan sekadar aksesoris dalam pembangunan ekonomi, melainkan elemen mendasar dari Ketahanan Nasional di era kontemporer. Dalam dunia yang diwarnai oleh disrupsi teknologi, krisis iklim, konflik geopolitik, dan transformasi sosial yang cepat, ketahanan sebuah bangsa tidak lagi cukup hanya bertumpu pada kekuatan militer atau cadangan sumber daya alam. Yang lebih penting adalah kemampuan bangsa tersebut untuk terus berinovasi—menciptakan solusi baru, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan membentuk ulang masa depan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan kemajuan.

Tanpa inovasi, sistem nasional akan mudah terjebak dalam stagnasi. Kelembagaan menjadi usang, kebijakan menjadi reaktif, dan masyarakat kehilangan daya saing. Inovasi memberikan jalan keluar dari kebuntuan struktural dan membuka kemungkinan untuk menciptakan lompatan-lompatan strategis menuju masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketahanan yang berbasis inovasi adalah ketahanan yang dinamis, adaptif, dan proaktif—mampu merespons tantangan baru sekaligus menciptakan peluang transformatif.

Namun, membangun ketahanan berbasis inovasi bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Ia

memerlukan sinergi antarsektor—antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil—dalam menciptakan ekosistem inovatif yang berkelanjutan. Kebijakan publik harus diarahkan pada penciptaan ruang eksperimentasi, penghapusan hambatan struktural, dan pemberian insentif bagi ide-ide segar. Sementara itu, sektor pendidikan dan pelatihan harus melahirkan generasi baru pemimpin yang berpikir terbuka, kritis, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Dalam konteks ini, peran Lemhannas RI menjadi sangat strategis. Sebagai lembaga pencetak pemimpin dan pusat pemikiran strategis bangsa, Lemhannas memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem pemikiran dan aksi strategis yang berpijak pada inovasi. Rejuvenasi Lemhannas tidak hanya mencakup pembaruan struktur internal, tetapi juga transformasi orientasi kelembagaan—dari lembaga yang bersifat reaktif menjadi aktor yang proaktif dalam mendesain masa depan.

Lemhannas diharapkan mampu mempromosikan inovasi sebagai prinsip utama dalam ketahanan nasional melalui berbagai program pendidikan, riset, dan advokasi kebijakan. Selain itu, Lemhannas juga perlu mendorong integrasi antara inovasi digital, inovasi sosial, dan inovasi hijau dalam pendekatan strategisnya. Semua itu bertujuan untuk mendukung visi besar Indonesia Maju 2045, di mana Indonesia tidak hanya bertahan dalam ketidakpastian global, tetapi juga memimpin dalam penciptaan tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan menjadikan inovasi sebagai jantung dari strategi Ketahanan Nasional, Lemhannas RI dapat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan di masa depan, tetapi juga tumbuh dan memimpin.

BAB 5

Peran Strategis Generasi Muda dalam Ketahanan dan Kepemimpinan Masa Depan

Indonesia berada di titik krusial sejarah demografisnya, dengan lebih dari 64 juta penduduk tergolong pemuda. Bonus demografi ini adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Jika dimanfaatkan secara tepat, generasi muda akan menjadi penggerak utama Ketahanan Nasional dan pelopor kepemimpinan masa depan. Namun, jika gagal dibina, potensi ini justru bisa menjadi sumber ketegangan sosial, pengangguran massal, dan stagnasi pembangunan.

Dalam konteks ketahanan dan kepemimpinan nasional, generasi muda tidak bisa lagi diposisikan hanya sebagai penerus. Mereka harus diakui sebagai aktor strategis sejak hari ini. Generasi muda memiliki keunggulan khas yang tak dimiliki generasi sebelumnya: akses luas terhadap informasi global, kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi, serta keberanian untuk berpikir out-of-the-box. Mereka adalah agen perubahan

yang dapat mendobrak kebuntuan sistemik, memperbarui cara pandang, dan memimpin inovasi dalam berbagai sektor.

Ketahanan Nasional di era disrupsi digital, perubahan iklim, dan geopolitik yang dinamis memerlukan karakter kepemimpinan baru—kepemimpinan yang inklusif, kolaboratif, dan visioner. Generasi muda Indonesia menunjukkan potensi luar biasa dalam hal ini. Banyak di antara mereka yang telah membuktikan kapasitas kepemimpinan dalam gerakan sosial, inovasi teknologi, kewirausahaan sosial, hingga advokasi lingkungan. Ini menunjukkan bahwa bibit kepemimpinan strategis sudah mulai tumbuh, tinggal bagaimana negara hadir untuk menyemai dan menguatkannya.

Oleh karena itu, pemberdayaan generasi muda harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Pendidikan kepemimpinan strategis, penguatan karakter kebangsaan, literasi digital, serta akses terhadap pengambilan keputusan harus diberikan sejak dini. Dalam hal ini, Lemhannas RI dapat memainkan peran penting sebagai inkubator kepemimpinan muda strategis nasional, dengan membuka jalur pembinaan lintas usia dan inklusif terhadap talenta muda dari berbagai latar belakang.

Lebih jauh, pelibatan generasi muda dalam agenda-agenda strategis nasional—seperti diplomasi publik, transformasi digital, pembangunan hijau, dan tata kelola pemerintahan—harus menjadi kebijakan utama. Bukan sebagai pelengkap simbolik, tetapi sebagai mitra sejati dalam merancang masa depan bangsa. Kepercayaan yang diberikan negara kepada generasi muda akan menciptakan efek psikologis dan sosial yang positif, memperkuat loyalitas kebangsaan dan mempercepat regenerasi kepemimpinan nasional.

Kesimpulannya, generasi muda bukan sekadar harapan masa depan, tetapi pilar utama masa kini. Dalam upaya membangun

Ketahanan Nasional yang berkelanjutan dan kepemimpinan yang transformatif menuju Indonesia Emas 2045, keterlibatan strategis generasi muda adalah keharusan, bukan pilihan. Lemhannas RI bersama seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam memastikan potensi ini tidak disia-siakan, melainkan dikonversi menjadi energi besar untuk kemajuan dan kedaulatan Indonesia.

A. Generasi Muda dan Bonus Demografi

Indonesia sedang berada di ambang puncak bonus demografi, yang diprediksi terjadi antara tahun 2025 hingga 2035. Pada masa ini, struktur penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang secara teoritis memiliki potensi luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, serta memperkuat Ketahanan Nasional. Bonus demografi bukan sekadar fenomena statistik, melainkan momentum sejarah yang dapat menjadi titik balik menuju kejayaan bangsa—jika dikelola dengan cermat dan tepat sasaran.

Potensi generasi muda dalam konteks bonus demografi mencakup lebih dari sekadar tenaga kerja. Mereka adalah sumber daya strategis yang membawa semangat baru, daya inovasi tinggi, kemampuan adaptasi teknologi, serta kepekaan terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, inklusivitas, dan keadilan sosial. Mereka dapat menjadi agen transformasi, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, potensi ini hanya akan bermakna jika ditopang oleh ekosistem pembangunan manusia yang kuat.

Ironisnya, di tengah peluang besar ini, Indonesia juga menghadapi tantangan serius. Tingkat pengangguran terbuka pada pemuda masih tinggi, kualitas pendidikan dan keterampilan belum merata, serta masih banyak anak muda yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama kesehatan mental. Belum lagi rendahnya partisipasi generasi

muda dalam proses-proses pengambilan keputusan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jika persoalan-persoalan ini tidak segera ditangani, bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah, dapat berubah menjadi bencana demografi—yakni beban sosial dan ekonomi yang besar akibat produktivitas yang stagnan dan tingginya angka ketergantungan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang secara langsung menyasar penguatan kapasitas generasi muda. Pendidikan vokasional, peningkatan literasi digital, kewirausahaan pemuda, dan penguatan karakter kebangsaan harus menjadi prioritas nasional. Negara perlu menciptakan lebih banyak ruang partisipasi politik, ekonomi, dan sosial bagi generasi muda agar mereka tidak sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Lembaga-lembaga strategis seperti Lemhannas RI memiliki peran penting dalam membina dan menginspirasi generasi muda untuk menjadi pemimpin transformatif. Dengan membuka program kepemudaan lintas sektor, menyediakan forum kajian strategis yang melibatkan kaum muda, serta menjadi wadah dialog antar generasi, Lemhannas dapat berkontribusi langsung dalam menjembatani potensi demografi dengan visi Ketahanan Nasional.

Kesimpulannya, bonus demografi adalah peluang emas yang tak boleh disia-siakan. Investasi pada generasi muda hari ini akan menentukan kekuatan dan ketahanan Indonesia esok hari. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, generasi muda harus ditempatkan di garis depan, sebagai penggerak utama masa depan bangsa yang tangguh, berdaulat, dan berkeadilan.

B. Dimensi Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional

Bonus demografi yang tengah dialami Indonesia tidak hanya menyajikan peluang ekonomi semata, melainkan juga tantangan

dan tanggung jawab besar terhadap kesinambungan Ketahanan Nasional. Di tengah perubahan zaman yang ditandai oleh digitalisasi, kompleksitas geopolitik, serta krisis iklim, generasi muda menjadi aktor strategis yang memiliki potensi transformatif. Oleh karena itu, memperkuat posisi dan peran generasi muda dalam enam dimensi utama Ketahanan Nasional menjadi keharusan historis dan politis.

1. **Ketahanan Ideologi dan Kebangsaan**

   Generasi muda berada di garis depan dalam mempertahankan jati diri bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi ideologi transnasional, kaum muda kerap menjadi sasaran utama kampanye radikalisme, ekstremisme, bahkan disinformasi ideologis. Media sosial dan platform digital menjadi medan tempur baru, tempat narasi kebangsaan bersaing dengan propaganda yang dapat merusak semangat persatuan.

   Untuk menjawab tantangan ini, penting bagi generasi muda memiliki ketahanan ideologi yang kokoh, berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang inklusif. Pendidikan karakter tidak bisa lagi sebatas teori di kelas; ia harus ditransformasikan ke dalam aksi nyata: keterlibatan dalam organisasi kebangsaan, produksi konten kreatif yang mempromosikan nilai-nilai persatuan, serta partisipasi dalam gerakan sosial berbasis nilai luhur budaya bangsa. Negara dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam membangun ekosistem digital yang sehat, agar generasi muda menjadi produsen narasi kebangsaan, bukan korban polarisasi.

2. **Ketahanan Sosial dan Budaya**

   Ketahanan sosial adalah kemampuan suatu masyarakat untuk menjaga kohesi, solidaritas, dan toleransi di tengah keragaman. Generasi muda memainkan peran vital dalam dimensi ini karena mereka adalah agen utama perubahan

budaya dan pengguna terbesar teknologi informasi. Sayangnya, media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog sering kali menjadi ruang konflik, menyulut kebencian dan disinformasi.

Sebagai pelopor budaya digital, generasi muda harus menjadi duta toleransi dan pelindung nilai-nilai sosial yang inklusif. Mereka harus mampu memanfaatkan ruang digital sebagai sarana untuk menyuarakan pluralisme, mempromosikan kerja sama antarbudaya, dan memperkuat kesadaran akan identitas kebangsaan. Gerakan komunitas pemuda, forum dialog lintas iman, dan kolaborasi kreatif antar daerah adalah contoh praktik baik yang harus diperluas. Ketahanan sosial akan tumbuh jika generasi muda menjadi jembatan antaridentitas, bukan tembok pemisah.

3. Ketahanan Ekonomi

Dalam era ekonomi digital dan industri kreatif, pemuda tidak hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. Wirausahawan muda tumbuh di berbagai sektor, mulai dari agritech, fintech, edutech, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan oleh kebijakan negara.

Untuk memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional, pemuda perlu didukung melalui pelatihan keterampilan masa depan (future skills), kemudahan akses permodalan, inkubasi bisnis rintisan (start-up), dan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha muda. Kebijakan fiskal dan regulasi juga perlu disesuaikan agar lebih ramah terhadap model bisnis generasi muda yang inovatif dan cepat berubah. Selain itu, wirausaha sosial yang menggabungkan profit dan dampak sosial harus menjadi model ideal bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

4. **Ketahanan Ekologis**

Krisis iklim adalah salah satu tantangan terbesar abad ke-21. Generasi muda telah menunjukkan kesadaran tinggi terhadap isu ini, ditandai dengan munculnya gerakan komunitas hijau, inisiatif pertanian urban, daur ulang kreatif, hingga kampanye pelestarian lingkungan berbasis digital. Inilah bentuk ketahanan ekologis yang tumbuh dari akar rumput, dipelopori oleh kaum muda yang sadar akan pentingnya keberlanjutan.

Namun, agar gerakan ini memiliki dampak sistemik, negara harus melihat generasi muda sebagai mitra dalam penyusunan kebijakan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas pemuda perlu difasilitasi melalui forum konsultatif, dana inovasi hijau, dan program pelatihan ekolider. Ketahanan ekologis bukan hanya tentang mitigasi bencana, tetapi tentang membentuk peradaban hijau yang berkelanjutan. Dan pemuda adalah arsitek utamanya.

5. **Ketahanan Digital dan Teknologi**

Sebagai digital native, generasi muda memiliki keunggulan kompetitif dalam menguasai teknologi. Namun, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat kedaulatan, keadilan, dan efisiensi sistem nasional. Ketahanan digital tidak hanya menyangkut keamanan siber, tetapi juga kemampuan bangsa untuk mengelola data, mengembangkan teknologi mandiri, dan menciptakan inovasi strategis.

Pemuda harus didorong untuk menjadi inovator dalam bidang kecerdasan buatan, blockchain, teknologi hijau, serta solusi digital untuk pendidikan dan pelayanan publik. Negara perlu membangun ekosistem riset dan inovasi yang inklusif, memperluas akses terhadap laboratorium digital, dan mendorong kemitraan universitas–industri yang melibatkan pemuda sebagai pelaku utama. Di sisi lain, literasi digital dan kesadaran etika penggunaan teknologi juga harus ditanamkan

sejak dini agar generasi muda tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

6. **Ketahanan Kepemimpinan dan Tata Kelola**

   Ketahanan nasional memerlukan regenerasi kepemimpinan yang sehat. Generasi muda harus dilibatkan secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sayangnya, ruang partisipasi pemuda dalam politik dan kebijakan publik masih terbatas, seringkali karena alasan senioritas atau struktur birokrasi yang tertutup.

   Untuk itu, negara dan lembaga strategis seperti Lemhannas RI harus membuka ruang kaderisasi kepemimpinan sejak dini. Program kepemimpinan lintas sektor, inkubasi kebijakan publik, serta forum deliberatif digital dapat menjadi wadah pembentukan pemimpin muda yang visioner dan etis. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi mahasiswa, komunitas sosial, hingga badan legislatif pemuda harus dipandang sebagai laboratorium kepemimpinan yang sah dan strategis. Kepemimpinan masa depan tidak boleh hanya diwariskan, tetapi harus dibentuk melalui proses yang inklusif, meritokratis, dan berkelanjutan.

Dimensi peran generasi muda dalam Ketahanan Nasional sangatlah luas dan multidimensional. Mereka bukan hanya pewaris masa depan, tetapi penggerak utama masa kini. Dengan memperkuat peran pemuda dalam enam dimensi strategis ini—ideologi, sosial budaya, ekonomi, ekologi, digital, dan kepemimpinan—Indonesia dapat membangun Ketahanan Nasional yang adaptif, transformatif, dan berkelanjutan. Peran Lemhannas RI dalam mendukung, membina, dan memberdayakan generasi muda menjadi sangat krusial. Inilah saatnya menjadikan generasi muda sebagai pilar utama Ketahanan Nasional menuju Indonesia Emas 2045.

C. Tantangan dalam Pemberdayaan Generasi Muda

Di tengah potensi besar yang dimiliki generasi muda Indonesia, terdapat pula tantangan struktural dan kultural yang menghambat kapasitas mereka sebagai agen perubahan dan pilar Ketahanan Nasional. Bonus demografi tidak secara otomatis menjadi keuntungan strategis tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Justru, jika dibiarkan tanpa arah, potensi ini dapat berubah menjadi beban sosial dan sumber ketidakstabilan jangka panjang.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Ketimpangan mutu pendidikan menyebabkan terjadinya jurang kompetensi antara pemuda di kota besar dan di daerah tertinggal. Selain itu, sistem pendidikan formal masih cenderung terlalu teoritis dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi yang cepat.

Kedua, tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan pemuda, terutama lulusan perguruan tinggi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja. Banyak pemuda yang akhirnya terjebak dalam sektor informal dengan penghasilan tidak pasti dan tanpa jaminan sosial. Tanpa akses terhadap pelatihan vokasi dan kesempatan kewirausahaan yang inklusif, ketahanan ekonomi kaum muda akan tetap rapuh.

Ketiga, ketimpangan digital antarwilayah menciptakan hambatan besar dalam pengembangan potensi generasi muda. Di satu sisi, sebagian pemuda di kota-kota besar telah mampu menjadi pelaku inovasi digital dan teknologi. Di sisi lain, jutaan pemuda di desa atau daerah tertinggal masih mengalami kesulitan akses internet dan keterbatasan literasi digital. Hal ini memperlebar jurang kesenjangan dan memperlambat pemerataan pembangunan sumber daya manusia.

Tantangan *keempat* adalah minimnya partisipasi generasi muda dalam proses pengambilan keputusan publik. Meskipun berbagai isu sosial, lingkungan, dan tata kelola sangat berdampak pada masa depan mereka, suara pemuda seringkali belum cukup mendapat tempat dalam ruang-ruang kebijakan. Birokrasi yang hierarkis dan politisasi yang eksklusif membuat partisipasi pemuda menjadi simbolik, bukan substansial.

Selain itu, terdapat stigma kultural yang menganggap pemuda sebagai kelompok yang belum cukup matang untuk memimpin. Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa banyak perubahan besar justru digerakkan oleh kekuatan moral dan keberanian kaum muda. Dari Sumpah Pemuda 1928, Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998, hingga gelombang inovasi sosial dan digital saat ini, generasi muda selalu hadir sebagai katalis perubahan sosial-politik.

Maka, pemberdayaan pemuda harus dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan bangsa. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kebijakan afirmatif, reformasi sistem pendidikan, peningkatan konektivitas digital, serta penciptaan ruang partisipasi yang nyata bagi anak muda untuk turut menentukan arah masa depan bangsanya.

D. Strategi Nasional untuk Memberdayakan Generasi Muda

Untuk membangun Ketahanan Nasional yang kokoh dan kepemimpinan masa depan yang transformatif, Indonesia harus menjadikan pemberdayaan generasi muda sebagai agenda strategis nasional. Bonus demografi yang sedang dinikmati tidak akan memberikan hasil optimal tanpa desain kebijakan yang menyeluruh dan konsisten. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan generasi muda tidak boleh bersifat sektoral atau simbolik, melainkan harus menjadi kerangka besar yang mengintegrasikan pendidikan, partisipasi politik, inovasi ekonomi, serta pembentukan karakter dan kepemimpinan.

Berikut ini adalah lima pilar utama strategi nasional yang dapat dijadikan acuan dalam memberdayakan generasi muda Indonesia.

1. **Revitalisasi Pendidikan dan Vokasi**

   Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk generasi muda yang adaptif dan kompeten. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah ketimpangan kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan masa depan.

   Revitalisasi ini mencakup pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan industri global, seperti kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan, robotika, desain digital, dan kewirausahaan. Pendidikan berbasis proyek (*project-based learning*), magang industri, dan kerja sama dengan sektor swasta perlu diperluas agar pemuda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja.

   Di samping itu, akses terhadap pendidikan vokasi harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Ini bisa dilakukan melalui program *mobile training unit*, platform pelatihan daring bersertifikat, serta beasiswa keterampilan digital bagi pelajar dan pemuda dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen ketahanan ekonomi bangsa.

2. **Inklusi Pemuda dalam Kebijakan Publik**

   Partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan adalah elemen penting dalam demokrasi yang sehat dan berketahanan. Sayangnya, hingga saat ini ruang partisipasi pemuda masih terbatas pada forum-forum simbolik. Padahal,

generasi muda memiliki gagasan segar, sensitivitas terhadap isu-isu masa kini, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

Oleh karena itu, strategi nasional harus mendorong inklusi pemuda dalam kebijakan publik secara substansial. Pemerintah pusat dan daerah dapat menginisiasi mekanisme *Parlemen Pemuda* atau *Youth Policy Forum* yang memiliki kapasitas untuk memberikan masukan kebijakan dan melakukan pengawasan sosial. Selain itu, perlu dikembangkan platform digital yang memungkinkan pemuda menyampaikan ide, aspirasi, dan kritik secara konstruktif dalam proses legislasi dan perencanaan pembangunan.

Keterlibatan pemuda dalam Musrenbang, penyusunan RPJMD, serta program pengembangan desa akan memperkuat akar demokrasi partisipatif dan menciptakan generasi pemimpin yang paham tata kelola dari level paling dasar.

3. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda

Dalam era ekonomi digital dan industri kreatif, pemuda memiliki potensi luar biasa sebagai pelaku inovasi. Namun, potensi ini sering terhambat oleh kurangnya akses terhadap pembiayaan, inkubasi, pendampingan bisnis, dan pasar. Oleh karena itu, perlu dibangun ekosistem kewirausahaan pemuda yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi ini mencakup pemberian insentif bagi start-up dan UMKM yang dipimpin pemuda, penyediaan program inkubator bisnis di setiap provinsi, hingga penciptaan ruang-ruang kolaborasi seperti *co-working space* dan *makerspace* berbasis komunitas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan BUMN, sektor swasta, dan lembaga donor internasional untuk memberikan dana hibah, pelatihan manajerial, serta akses pasar domestik dan global.

Khususnya di bidang ekonomi kreatif dan teknologi digital, pemuda Indonesia telah membuktikan kapasitasnya melalui keberhasilan berbagai platform digital lokal. Penguatan kebijakan pro-inovasi akan mempercepat transformasi ini sekaligus menjadikan pemuda sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4. **Pendidikan Kebangsaan dan Kepemimpinan Transformasional**

   Ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada ketangguhan ideologi, karakter, dan kepemimpinan. Oleh sebab itu, penting untuk memperkuat pendidikan kebangsaan yang progresif dan kepemimpinan transformasional bagi generasi muda.

   Program seperti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan *Lemhannas Goes to Campus* dapat menjadi wadah pelatihan kepemimpinan strategis bagi pemuda dari berbagai latar belakang—mulai dari aktivis, pelaku usaha, akademisi muda, hingga penggerak komunitas lokal. Selain itu, *leadership camp*, pelatihan diplomasi kebudayaan, dan program pertukaran pemuda internasional akan memperkaya wawasan global dan kemampuan negosiasi lintas budaya generasi muda Indonesia.

   Pendidikan kebangsaan juga harus memanfaatkan media digital untuk menyebarkan narasi kebangsaan yang inklusif, progresif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Dalam hal ini, pemuda tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi subjek yang aktif membentuk wacana publik tentang nasionalisme baru yang terbuka dan berwawasan global.

5. **Kemitraan Lintas Generasi dan Lintas Sektor**

   Tidak ada bangsa yang maju tanpa kolaborasi lintas generasi dan lintas sektor. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan pemuda harus dibingkai dalam semangat kemitraan yang

saling memperkaya antara generasi muda dan generasi senior, antara pemerintah dan masyarakat sipil, antara akademisi dan pelaku industri.

Program mentorship nasional yang mempertemukan pemimpin senior dengan pemuda-pemuda potensial dapat menjadi sarana transfer pengetahuan dan nilai. Kolaborasi antara kampus, pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas dapat menciptakan proyek-proyek inovasi sosial dan teknologi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Di tengah dinamika global yang kompleks, kemitraan semacam ini juga akan memperkuat jejaring strategis nasional dalam menghadapi tantangan lintas sektor seperti perubahan iklim, krisis energi, dan disrupsi teknologi. Pemuda harus didorong menjadi aktor utama dalam solusi, bukan hanya penerima kebijakan.

Pemberdayaan generasi muda bukan sekadar kebijakan pembangunan sumber daya manusia, tetapi strategi besar untuk memastikan keberlanjutan Ketahanan Nasional. Dalam dua dekade mendatang, pemuda hari ini akan menjadi pengambil keputusan, pemimpin komunitas, inovator, dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, strategi nasional harus berpijak pada pendekatan holistik: mengembangkan kapasitas, membuka ruang partisipasi, menanamkan nilai kepemimpinan, serta memperkuat ekosistem kolaboratif yang mendukung pemuda sebagai subjek perubahan.

Dengan strategi yang menyeluruh dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat membangun generasi emas 2045 yang tidak hanya unggul secara intelektual dan teknologi, tetapi juga tangguh secara ideologis, inklusif secara sosial, dan berdaya saing tinggi dalam tatanan dunia yang terus berubah.

E. Lemhannas RI dan Kepemimpinan Muda Masa Depan

Dalam era disrupsi global yang ditandai oleh kompleksitas dan ketidakpastian, kebutuhan akan kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berbasis nilai kebangsaan menjadi semakin mendesak. Indonesia tidak hanya memerlukan pemimpin yang mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga yang siap menavigasi masa depan dengan keberanian, integritas, dan inovasi. Di sinilah peran strategis Lemhannas RI menjadi sangat penting, khususnya dalam membentuk dan mempersiapkan kepemimpinan muda lintas generasi yang siap menghadapi era Indonesia Emas 2045.

Lemhannas RI, sebagai lembaga strategis negara di bidang pemantapan nilai kebangsaan, ketahanan nasional, dan kepemimpinan, memiliki peluang besar untuk mengembangkan pusat kaderisasi pemimpin nasional yang inklusif. Kaderisasi kepemimpinan muda seharusnya tidak lagi dibatasi hanya pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau militer, tetapi juga perlu melibatkan aktor-aktor nonformal yang berpengaruh dalam transformasi sosial. Ini mencakup aktivis muda, inovator teknologi, pelaku ekonomi kreatif, pemuda adat, serta pemimpin komunitas dari berbagai wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan hal ini, Lemhannas dapat menginisiasi Program Kaderisasi Kepemimpinan Muda Nasional, yang dirancang secara holistik dengan pendekatan multidisiplin. Program ini dapat mencakup pelatihan strategis mengenai geopolitik, kebijakan publik, ketahanan nasional, komunikasi strategis, serta simulasi pengambilan keputusan berbasis skenario. Di samping itu, pelatihan harus menanamkan nilai integritas, nasionalisme progresif, dan keberanian moral dalam menghadapi dilema-dilema kepemimpinan nyata.

Lebih lanjut, penting bagi Lemhannas untuk memperkuat fungsi riset dan kajian strategis yang secara khusus mendalami

dinamika generasi muda. Riset mengenai preferensi nilai, partisipasi politik digital, pola kepemimpinan baru, hingga tantangan identitas generasi muda akan menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan kaderisasi yang kontekstual dan relevan. Dengan data dan pemahaman yang kuat tentang generasi muda, Lemhannas akan mampu menjadi *knowledge center* yang menyuplai wawasan strategis bagi perumusan kebijakan nasional yang ramah pemuda.

Selain itu, dalam rangka membangun kapasitas global generasi muda Indonesia, Lemhannas dapat menjalin kemitraan internasional dengan lembaga-lembaga strategis serupa di negara-negara sahabat. Program pertukaran pemimpin muda strategis, simposium internasional, serta pelatihan bersama di bidang geopolitik dan diplomasi dapat menjadi bagian integral dari diplomasi kepemudaan Indonesia di tingkat global.

Dengan pendekatan yang progresif, inklusif, dan berbasis nilai kebangsaan, Lemhannas RI memiliki potensi besar untuk mentransformasikan dirinya dari sekadar lembaga pelatihan kepemimpinan konvensional menjadi inkubator pemimpin masa depan bangsa. Pemimpin-pemimpin muda yang dibina Lemhannas akan menjadi penggerak transformasi Indonesia menuju negara yang tangguh, berdaulat, dan berdaya saing tinggi dalam percaturan global.

F. Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar harapan masa depan, melainkan kekuatan nyata yang sedang tumbuh dan dapat menjadi motor utama Ketahanan Nasional Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Di tengah dinamika global yang serba cepat, tidak menentu, dan sarat disrupsi, keberadaan generasi muda yang visioner, tangguh, dan adaptif menjadi aset strategis yang tak ternilai bagi bangsa.

Dengan jumlah lebih dari separuh populasi Indonesia yang tergolong usia produktif, bangsa ini berada pada momentum emas—bonus demografi—yang tidak akan terulang. Namun, potensi ini tidak otomatis membawa berkah, melainkan menuntut upaya serius dalam membina, memberdayakan, dan melibatkan generasi muda secara aktif dalam pembangunan nasional. Mereka tidak boleh dipandang hanya sebagai objek kebijakan, tetapi harus diakui sebagai subjek utama dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.

Generasi muda memiliki peran multidimensional dalam memperkuat Ketahanan Nasional: mulai dari ideologi, sosial budaya, ekonomi, digital, hingga ekologi. Mereka mampu menjadi pelopor perubahan sosial melalui inovasi teknologi, kewirausahaan kreatif, aktivisme lingkungan, dan diplomasi digital. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut, negara harus menghadirkan strategi pemberdayaan yang menyeluruh: pendidikan berkualitas, ruang partisipasi publik, akses ekonomi, perlindungan hak digital, hingga kaderisasi kepemimpinan sejak dini.

Dalam konteks ini, Lemhannas RI memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai institusi pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan strategis, Lemhannas tidak bisa hanya berkutat pada pola lama yang eksklusif dan elitis. Rejuvenasi Lemhannas harus menyertakan agenda besar dalam memperkuat posisi generasi muda sebagai jantung dari strategi Ketahanan Nasional dan keberlanjutan kepemimpinan negara. Program kaderisasi kepemimpinan muda yang inklusif, riset mendalam tentang dinamika generasi muda, serta kemitraan global dalam membangun kepemimpinan muda strategis, harus menjadi bagian dari transformasi institusional Lemhannas ke depan.

Dengan mengintegrasikan generasi muda secara strategis ke dalam narasi dan praksis ketahanan nasional, Indonesia tidak hanya akan memperoleh keuntungan demografis, tetapi juga

membentuk generasi pemimpin masa depan yang tidak tercerabut dari akar kebangsaan, sekaligus siap menjawab tantangan global. Inilah fondasi dari Ketahanan Nasional yang dinamis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Generasi muda bukan beban, melainkan peluang. Mereka bukan sekadar penerus, tetapi pemimpin hari ini yang sedang dibentuk. Maka, komitmen untuk membina dan memberdayakan mereka adalah bagian tak terpisahkan dari visi Indonesia Maju 2045—sebuah bangsa besar yang tahan uji, bermartabat, dan berdaya saing global.

BAB 6

Menjemput Masa Depan dengan Keberanian

Indonesia tengah berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, bangsa ini memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan besar dunia—sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang menjanjikan, serta posisi geopolitik yang strategis. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga tak kalah besar: krisis iklim, disrupsi digital, ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, Indonesia memerlukan lebih dari sekadar rencana; Indonesia memerlukan keberanian.

Keberanian adalah fondasi moral dan mental dari setiap langkah transformatif. Dalam sejarah bangsa, perubahan besar selalu diawali oleh keberanian untuk mengatakan bahwa yang lama tak lagi cukup, dan yang baru harus diperjuangkan. Dari keberanian para pemuda mengucap Sumpah Pemuda 1928, hingga keberanian reformasi 1998, Indonesia dibentuk oleh semangat untuk menjemput masa depan dengan kepala tegak.

Dalam upaya membangun Ketahanan Nasional yang adaptif dan unggul, keberanian menjadi syarat mutlak. Keberanian untuk berinovasi, bukan hanya mengikuti arus global tetapi menciptakan solusi khas Indonesia. Keberanian untuk mereformasi sistem pendidikan, birokrasi, dan ekonomi, agar lebih inklusif, efisien, dan responsif. Keberanian untuk memberi ruang bagi generasi muda, suara-suara baru, dan pemikiran segar yang membawa perubahan.

Lebih jauh lagi, keberanian yang dibutuhkan bukan hanya di level individu, tetapi keberanian kolektif sebagai bangsa. Keberanian untuk meninggalkan ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan, dan beralih pada energi bersih. Keberanian untuk menjaga kedaulatan digital di tengah intervensi global. Keberanian untuk membela keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam seluruh kebijakan pembangunan.

Di sinilah pentingnya membangun budaya keberanian strategis dalam kepemimpinan nasional. Lemhannas RI, sebagai lembaga pembina pemimpin-pemimpin strategis bangsa, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai keberanian ini sejak awal. Bukan keberanian impulsif, tetapi keberanian yang dilandasi oleh integritas, kecerdasan visioner, dan cinta tanah air yang mendalam.

Menjemput masa depan bukan perkara menunggu waktu, tetapi soal keberanian untuk melangkah lebih dulu. Indonesia Maju 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi panggilan sejarah. Dan untuk menjawab panggilan itu, kita membutuhkan keberanian kolektif—keberanian untuk menciptakan masa depan, bukan sekadar mengantisipasinya. Karena bangsa yang berani, adalah bangsa yang akan bertahan, tumbuh, dan memimpin di masa depan.

A. Keberanian sebagai Pilar Kepemimpinan Strategis

Sepanjang sejarah umat manusia, pemimpin besar dikenang bukan karena mereka mengikuti arus, tetapi karena mereka

berani menentangnya ketika diperlukan. Mereka dikenang karena keberanian untuk berdiri tegak di saat orang lain ragu, dan karena kesediaan mereka menanggung risiko demi tujuan yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, keberanian semacam ini harus menjadi fondasi dari kepemimpinan strategis yang akan membawa bangsa ini menghadapi abad ke-21 dengan percaya diri dan visi yang jelas.

Keberanian dalam kepemimpinan strategis bukanlah keberanian yang impulsif, tetapi keberanian yang berakar pada moralitas, analisis mendalam, dan komitmen pada kebaikan bersama. Ia tampil dalam bentuk ketegasan membuat keputusan penting di tengah ketidakpastian, ketika data belum lengkap, tekanan politik tinggi, dan masa depan belum sepenuhnya tergambar. Pemimpin yang strategis tidak menunggu semua keadaan ideal; ia membaca tanda zaman dan bertindak proaktif, bukan reaktif.

Selain itu, keberanian juga berarti berani menyampaikan kebenaran, meskipun tidak populer atau bertentangan dengan kepentingan jangka pendek. Pemimpin yang berani tidak terjebak pada popularitas semata, tetapi berdiri pada nilai-nilai dan integritas. Dalam konteks ini, keberanian moral adalah syarat untuk menjaga arah kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat, lingkungan, dan keberlanjutan bangsa.

Keberanian dalam kepemimpinan strategis juga mencakup kemampuan mengambil risiko yang terukur. Pemimpin yang visioner menyadari bahwa transformasi besar tidak mungkin terjadi tanpa keberanian untuk mencoba pendekatan baru, menembus zona nyaman, dan menantang status quo. Dalam dunia yang berubah cepat, mempertahankan cara lama bisa lebih berisiko daripada mengeksplorasi hal baru. Oleh karena itu, keberanian untuk menanggalkan pendekatan usang adalah bentuk kepemimpinan strategis yang adaptif.

Yang tak kalah penting, pemimpin yang berani adalah mereka yang menginisiasi perubahan meski tahu bahwa jalannya tak mudah. Mereka membangun konsensus, merangkul berbagai pemangku kepentingan, dan tetap teguh pada arah transformasi nasional meski menghadapi kritik, resistensi, atau kegagalan awal.

Untuk menjawab tantangan masa depan, Indonesia memerlukan tipe kepemimpinan yang berani membangun jalan baru, bukan sekadar memperbaiki jalan lama. Kepemimpinan yang tidak hanya memiliki imajinasi masa depan, tetapi juga keberanian moral untuk memperjuangkannya dan kapasitas manajerial serta kolaboratif untuk mewujudkannya. Inilah kepemimpinan strategis yang dibutuhkan Indonesia menuju visi 2045: pemimpin yang berani berpikir besar, bertindak cermat, dan bertahan dalam badai.

B. Menjawab Tantangan Global dengan Ketahanan Inklusif

Kita hidup dalam era ketidakpastian global yang kian kompleks. Ketegangan geopolitik antara negara-negara besar, perubahan iklim yang memperparah bencana alam, ketimpangan distribusi pangan, hingga kemajuan teknologi yang begitu pesat—terutama dalam kecerdasan buatan—telah mengubah lanskap kehidupan global secara drastis. Di tengah turbulensi ini, Indonesia tidak bisa sekadar bertahan; Indonesia harus mampu menjawab tantangan global dengan cara yang transformatif, adaptif, dan berkeadilan.

Dalam konteks inilah, konsep ketahanan inklusif menjadi kunci utama. Ketahanan tidak boleh lagi dimaknai sebagai kekuatan militer atau stabilitas politik semata, tetapi sebagai kemampuan kolektif suatu bangsa untuk melindungi, memberdayakan, dan memajukan seluruh rakyatnya dalam menghadapi tekanan global. Ketahanan inklusif berarti membangun kekuatan nasional yang berakar pada solidaritas sosial, partisipasi warga, dan keadilan struktural.

Ketahanan inklusif menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Artinya, pertumbuhan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elite ekonomi, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pinggiran. Pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan teknologi digital merupakan prasyarat untuk membangun bangsa yang tahan terhadap gejolak ekonomi global.

Lebih jauh, ketahanan inklusif juga membutuhkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Kebijakan nasional tidak boleh diputuskan secara top-down, melainkan harus dirancang melalui proses deliberatif yang terbuka, inklusif, dan menghargai keberagaman suara rakyat. Demokrasi yang partisipatif dan tata kelola yang transparan adalah pondasi bagi ketahanan yang tangguh dan berkelanjutan.

Perubahan global kerap berdampak paling keras pada mereka yang paling lemah. Oleh karena itu, ketahanan sejati mengharuskan negara hadir untuk melindungi kelompok rentan dan marjinal: petani kecil, buruh informal, penyandang disabilitas, komunitas adat, serta generasi muda yang belum memperoleh akses setara. Perlindungan sosial, jaminan pekerjaan, dan kebijakan afirmatif adalah bentuk nyata dari keberpihakan strategis terhadap keadilan.

Pada akhirnya, menjawab tantangan global hari ini tidak cukup dengan efisiensi teknokratis semata. Keberanian moral dan politik dibutuhkan untuk memperjuangkan pembangunan yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis. Indonesia harus meneguhkan diri sebagai negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan politik, tetapi juga adil secara sosial dan bermartabat dalam kemanusiaan.

Ketahanan inklusif adalah jalan Indonesia menuju masa depan: masa depan yang kokoh, bersatu, dan berkeadilan dalam menghadapi dunia yang terus berubah.

C. Meneguhkan Identitas Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

Di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, budaya populer, dan pola pikir transnasional, setiap bangsa dihadapkan pada tantangan eksistensial: bagaimana tetap relevan di kancah global tanpa kehilangan jati dirinya. Indonesia, sebagai negara multikultural dengan warisan sejarah dan nilai luhur yang kaya, tidak boleh menjadi penonton pasif dalam arus ini. Sebaliknya, Indonesia harus mampu meneguhkan identitas bangsanya sebagai bagian dari strategi Ketahanan Nasional yang berkelanjutan.

Menjaga identitas bangsa bukan berarti bersikap eksklusif atau tertutup terhadap perubahan global. Justru sebaliknya, identitas yang kokoh memungkinkan bangsa ini untuk membuka diri secara selektif, kritis, dan bermartabat terhadap pengaruh luar. Dalam konteks ini, identitas bangsa harus berfungsi sebagai kompas moral dan budaya, bukan sebagai dinding penghalang integrasi global. Keberanian untuk berdialog, menerima hal baru, dan berkolaborasi lintas bangsa hanya bisa tumbuh dari keyakinan yang kuat terhadap akar budaya dan nilai nasional sendiri.

Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus filosofi hidup bangsa, perlu diletakkan sebagai nilai yang hidup dan dinamis. Ia bukan sekadar doktrin formal atau simbol retoris, melainkan harus hadir dalam tindakan nyata masyarakat sehari-hari—dalam praktik kebangsaan yang inklusif, dalam tata kelola yang adil, dan dalam semangat gotong royong yang berkesinambungan. Pancasila harus ditafsirkan ulang secara kontekstual dan progresif, agar dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya.

Keberanian ideologis adalah sikap untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam berdialog dengan dunia. Diplomasi budaya Indonesia dapat tumbuh subur bila ia bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa yang diwujudkan dalam seni, sastra, teknologi, dan interaksi sosial yang mencerminkan toleransi, keadilan, dan

solidaritas. Dengan demikian, nasionalisme tidak dilihat sebagai sikap tertutup atau defensif, tetapi sebagai energi kreatif untuk berkontribusi dalam peradaban global.

Upaya meneguhkan identitas bangsa tidak cukup hanya melalui pendidikan formal. Ia harus dihidupkan di ruang publik, baik secara fisik maupun digital. Media sosial, film, musik, dan literasi digital adalah medan strategis baru tempat narasi kebangsaan diuji dan dibentuk. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan kultural yang mampu memanfaatkan platform ini untuk memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang bangga akan jati dirinya, tetapi juga terbuka, adaptif, dan progresif.

Meneguhkan identitas bangsa di tengah globalisasi bukanlah langkah mundur, melainkan lompatan strategis. Dengan identitas yang kuat dan nilai yang jelas, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain—tidak larut, tetapi hadir; tidak tenggelam, tetapi memberi makna.

D. Transformasi Digital dan Peran Negara

Di era disrupsi teknologi yang bergerak sangat cepat, transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi negara yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Namun, transformasi digital sejatinya bukan hanya soal pengadaan teknologi atau modernisasi sistem informasi. Ia adalah sebuah perubahan paradigma yang menyentuh inti dari tata kelola negara: bagaimana pemerintah melayani rakyat, mengelola sumber daya, serta merancang kebijakan yang responsif terhadap masa depan.

Transformasi digital yang sejati membutuhkan keberanian negara untuk berpikir dan bertindak di luar pola lama yang birokratis dan lamban. **Keberanian digital** dimulai dari upaya massif dalam meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat, agar teknologi tidak menjadi pemisah antara yang melek dan yang tertinggal. Literasi digital bukan hanya tentang

keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, etika bermedia, dan kesadaran terhadap hak dan keamanan digital.

Selain itu, reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi menjadi prasyarat penting. E-government dan layanan publik digital bukan hanya alat efisiensi, tetapi cerminan dari semangat transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Keberhasilan negara dalam mentransformasikan layanannya menjadi digital akan memperkuat kepercayaan publik dan membuka ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.

Namun, transformasi digital juga membawa risiko baru, terutama terkait dengan keamanan data dan kedaulatan digital. Negara harus hadir sebagai pelindung utama atas data pribadi warganya, serta sebagai penjaga atas infrastruktur digital nasional dari ancaman eksternal. Perlindungan data pribadi bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang membangun ekosistem kepercayaan antara negara, warga, dan penyedia layanan teknologi.

Lebih jauh, negara perlu menunjukkan keberanian strategis dalam berinvestasi pada riset dan pengembangan teknologi kunci masa depan, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, bioteknologi, dan energi digital. Tanpa kehadiran negara, sektor strategis ini akan dikuasai oleh segelintir korporasi global, meninggalkan negara dalam posisi pasif dan tergantung. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan teknologi nasional yang berdaulat, progresif, dan berbasis pada kepentingan jangka panjang bangsa.

Negara tidak boleh menjadi penonton dalam revolusi digital. Negara harus menjadi aktor utama yang memastikan teknologi digunakan untuk memperkuat **kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran**. Transformasi digital yang dipimpin negara haruslah bersifat inklusif, etis, dan berkelanjutan, serta menjadikan inovasi

sebagai pondasi utama Ketahanan Nasional. Dengan keberanian untuk mentransformasikan diri, negara akan mampu menavigasi masa depan digital dengan percaya diri dan arah yang jelas.

E. Keberanian Lingkungan: Transisi ke Ekonomi Hijau

Krisis iklim adalah tantangan terbesar dan paling mendesak yang dihadapi umat manusia pada abad ini. Perubahan iklim yang semakin cepat dan dampak lingkungan yang meluas telah memaksa semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah berani dan strategis dalam mengubah paradigma pembangunan yang selama ini berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan ketergantungan pada energi fosil. Keberanian lingkungan atau keberanian ekologis menjadi kata kunci dalam upaya mengarahkan bangsa ini menuju masa depan yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas dengan kekayaan hutan tropis, laut, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, memegang posisi strategis sekaligus tanggung jawab besar dalam perwujudan ekonomi hijau. Potensi ini bukan hanya sekadar aset alam yang harus dilestarikan, tetapi juga peluang besar untuk menjadi pionir dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia harus dimulai dari pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi yang ramah lingkungan. Sumber energi ini tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mencemari, tetapi juga membuka peluang bagi kemandirian energi nasional yang lebih aman dan berkelanjutan. Selain itu, konservasi hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi.

Keberanian ekologis juga harus diwujudkan melalui pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta ekonomi biru berbasis kelautan. Laut Indonesia yang luas dengan potensi sumber daya hayati yang kaya bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru yang ramah lingkungan, seperti budidaya perikanan berkelanjutan, pariwisata alam, dan inovasi kelautan yang tidak merusak ekosistem. Semua ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian alam.

Namun, keberanian untuk melakukan transisi ini tidak datang tanpa tantangan. Ada berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang mungkin bertentangan dengan agenda hijau, mulai dari kelompok industri fosil hingga hambatan birokrasi dan budaya lama yang masih kuat. Resistensi terhadap perubahan dan biaya jangka pendek yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat bisa menjadi rintangan berat. Di sinilah keberanian menjadi pilar utama: keberanian politik untuk mengambil keputusan yang berani dan visioner, serta keberanian ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya dalam jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Keberanian ini tidak hanya akan membawa manfaat ekologis, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang dihormati dan diperhitungkan dalam tata dunia baru yang mengedepankan keberlanjutan. Dalam era global yang semakin sadar akan pentingnya ekonomi hijau, posisi Indonesia sebagai pemimpin regional bahkan global dalam hal ini bisa memperkuat pengaruh politik dan ekonomi nasional secara signifikan.

Dengan keberanian ekologis, Indonesia tidak hanya menyelamatkan lingkungan dan generasi masa depan, tetapi juga mengukir sejarah sebagai bangsa yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang strategis. Transisi menuju ekonomi hijau adalah jalan panjang yang penuh risiko, tetapi keberanian

untuk melangkah itulah yang akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berkelanjutan.

F. Mempercepat Kepemimpinan Generasi Baru

Menjemput masa depan bukan hanya soal menyiapkan sumber daya, tetapi juga mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru yang mampu membawa bangsa ke arah kemajuan yang berkelanjutan. Kepemimpinan generasi baru harus lahir dari perpaduan kecerdasan akademik, kematangan etis, visi yang jauh ke depan, serta keberanian dalam bertindak. Di tengah kompleksitas tantangan global dan domestik, Indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin muda yang tidak sekadar menjalankan rutinitas, melainkan berani mengambil risiko demi perubahan positif.

Pemimpin muda masa depan harus mampu meninggalkan paradigma lama yang berorientasi pada pengelolaan konservatif. Mereka dituntut untuk menjadi pelopor inovasi dan transformasi yang dapat menjawab kebutuhan zaman. Kepemimpinan yang visioner harus diimbangi dengan keberanian moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta keberanian strategis untuk mengambil langkah berani walaupun penuh tantangan dan risiko.

Selain keberanian individual, kepemimpinan generasi baru juga harus mengedepankan kepemimpinan kolektif. Era pemimpin tunggal dengan karisma luar biasa yang mengandalkan kekuatan pribadi saja tidak lagi relevan. Kolaborasi lintas generasi dan lintas disiplin menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi masalah yang kompleks dan saling terkait. Sinergi antara pemimpin muda dengan tokoh senior, akademisi, praktisi industri, dan komunitas menjadi modal strategis untuk menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan.

Etika kepemimpinan menjadi fondasi utama dalam mempercepat munculnya pemimpin masa depan. Pemimpin

muda harus menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat sebagai prioritas utama, di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keberanian dalam kepemimpinan berarti keberanian untuk memihak kepada rakyat, kepada kebenaran yang seringkali tidak populer, serta kepada masa depan yang lebih baik bagi seluruh elemen bangsa. Tanpa landasan etika yang kuat, kepemimpinan apapun akan kehilangan arah dan legitimasi.

Dalam konteks ini, peran Lemhannas RI sangat strategis. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama dalam pembinaan kepemimpinan nasional, Lemhannas harus mempercepat proses kaderisasi generasi muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi motor perubahan bangsa. Lemhannas perlu membuka ruang yang lebih luas bagi inovator muda dari berbagai latar belakang, tidak hanya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau militer, tetapi juga aktivis sosial, wirausaha, pelaku seni, dan inovator teknologi.

Program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang inovatif dan inklusif harus dikembangkan, dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik generasi muda saat ini. Penguatan kapasitas dalam bidang pemikiran strategis, pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian, serta manajemen konflik dan perubahan menjadi aspek penting yang harus dikembangkan.

Lebih dari itu, Lemhannas harus mendorong dialog dan jejaring antar generasi, sehingga terjadi transfer nilai, pengalaman, dan ide yang konstruktif. Dengan demikian, muncul pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman wawasan kebangsaan dan integritas moral yang tinggi.

Menyiapkan kepemimpinan generasi baru bukan pekerjaan mudah, tetapi merupakan investasi paling berharga bagi masa depan bangsa. Dengan keberanian, visi, kolaborasi, dan etika

yang kuat, generasi muda Indonesia akan mampu membawa negara ini melewati berbagai tantangan dan menuju era kejayaan yang berkelanjutan. Lemhannas RI sebagai garda terdepan dalam pengembangan kepemimpinan nasional memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpin masa depan siap menjawab panggilan sejarah dengan keberanian dan komitmen yang teguh.

G. Rejuvenasi Lemhannas sebagai Cerminan Keberanian Institusional

Lemhannas RI memegang peranan strategis dalam menjaga dan memperkuat Ketahanan Nasional. Namun, dalam menghadapi dinamika zaman yang semakin cepat dan kompleks, Lemhannas harus menunjukkan keberanian institusional yang nyata melalui proses rejuvenasi yang menyeluruh. Rejuvenasi Lemhannas bukan semata-mata soal pembaruan struktural atau administratif, melainkan transformasi mendalam pada visi, misi, dan peran yang diemban. Keberanian ini harus menjadi landasan bagi Lemhannas untuk terus relevan dalam mengawal masa depan bangsa.

Sebagai pusat pemikiran strategis, Lemhannas harus berani mengambil posisi independen dan inovatif. Di tengah arus informasi yang cepat dan kadang disertai kepentingan politik, Lemhannas harus mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang tajam, kritis, serta berdasarkan data dan analisis yang kuat. Keberanian institusional ini akan memungkinkan Lemhannas untuk menjadi sumber rujukan terpercaya bagi pengambil kebijakan dan publik, sekaligus berkontribusi dalam merumuskan strategi nasional yang visioner dan adaptif terhadap perubahan global.

Selain itu, Lemhannas harus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan kepemimpinan nasional yang progresif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kurikulum pembinaan kepemimpinan perlu disesuaikan dengan tantangan masa depan, seperti revolusi digital, perubahan iklim, dan kompleksitas

geopolitik. Lemhannas perlu membuka ruang bagi pemimpin dari berbagai latar belakang, termasuk generasi muda, inovator, dan pelaku sektor kreatif, agar proses kaderisasi kepemimpinan tidak hanya menghasilkan figur yang kompeten secara teknis, tetapi juga visioner dan berani mengambil risiko demi kemajuan bangsa.

Lemhannas juga harus menjadi ruang dialektika kebangsaan yang inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Dalam konteks pluralitas Indonesia, keberanian institusional berarti membuka dialog terbuka yang konstruktif antara berbagai kelompok etnis, agama, dan sosial. Dengan demikian, Lemhannas dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan bangsa melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dinamis dan aplikatif dalam kehidupan modern.

Tidak kalah penting, Lemhannas harus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Keberanian institusional juga terwujud dalam kemampuan berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Lemhannas harus berani berada di garis depan dalam mendorong inovasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan domestik dan global, sehingga bangsa Indonesia mampu menatap masa depan dengan optimisme dan kesiapan menghadapi segala perubahan.

Hanya dengan keberanian untuk berubah dan berinovasi secara terus-menerus, Lemhannas dapat menjaga relevansi dan memperkuat kontribusinya dalam membangun Ketahanan Nasional. Rejuvenasi yang berorientasi pada keberanian institusional ini bukan sekadar kebutuhan internal Lemhannas, tetapi juga tuntutan strategis bagi bangsa yang ingin maju dan mandiri. Lemhannas sebagai institusi strategis harus menjadi contoh bagaimana sebuah lembaga dapat terus bertransformasi, beradaptasi, dan berani menghadapi tantangan zaman demi kejayaan dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

H. Kesimpulan

Bab ini menggarisbawahi sebuah kebenaran fundamental bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis atau tiba dengan sendirinya. Masa depan harus dijemput dengan sikap aktif dan keberanian—keberanian untuk melakukan perubahan, berani bermimpi besar, serta berani mengambil peran memimpin transformasi yang diperlukan. Indonesia, sebagai sebuah bangsa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang strategis, posisi geografis yang vital, dan warisan budaya yang kaya, sejatinya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan berpengaruh di panggung dunia. Namun, semua potensi tersebut hanya akan menjadi sia-sia tanpa keberanian untuk memanfaatkannya secara strategis dan visioner.

Keberanian dalam konteks ini bukan sekadar sifat emosional atau nekat, melainkan bentuk tertinggi dari ketahanan nasional yang sesungguhnya. Ketahanan tanpa keberanian akan berakhir pada stagnasi, kebekuan dalam pola-pola lama yang tidak mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, keberanian menjadikan ketahanan sebagai kekuatan yang dinamis, mampu menggerakkan transformasi yang fundamental dan berkelanjutan. Dengan keberanian, bangsa ini dapat menembus berbagai hambatan dan membuka jalan menuju kemajuan yang inklusif dan berkeadilan.

Seluruh elemen bangsa, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, dari para pemuda hingga akademisi, dari pelaku usaha hingga komunitas sosial, harus bersatu dalam semangat keberanian ini. Keberanian untuk berinovasi dalam kebijakan, keberanian untuk membuka ruang partisipasi yang luas bagi generasi muda, keberanian untuk menjaga dan meneguhkan identitas bangsa di tengah globalisasi, serta keberanian untuk bertanggung jawab atas masa depan ekologis dan sosial Indonesia. Semua ini merupakan bagian dari panggilan kolektif untuk menjadikan Indonesia bukan sekadar pengikut arus global, melainkan pemimpin dalam peradaban dunia yang baru.

Dalam perspektif ini, keberanian menjadi jembatan yang menghubungkan potensi besar bangsa dengan realisasi nyata masa depan yang diimpikan. Dengan keberanian, inovasi akan tumbuh subur; dengan keberanian, kepemimpinan akan berakar kuat; dan dengan keberanian, Ketahanan Nasional akan menjadi fondasi kokoh yang mengantarkan Indonesia pada posisi strategis di kancah global. Bab ini menegaskan bahwa keberanian bukanlah pilihan yang mudah, tetapi adalah keharusan yang tidak bisa ditawar jika bangsa ini ingin mengukir sejarah gemilang.

Oleh karena itu, mari kita gunakan keberanian sebagai motor penggerak kolektif yang menyatukan visi dan aksi. Lemhannas RI, sebagai lembaga strategis, berperan penting dalam menyiapkan dan membina pemimpin masa depan yang memiliki keberanian moral dan intelektual untuk membawa bangsa melampaui berbagai tantangan. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung inovasi dan keberanian dalam pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam proses perubahan yang inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulannya, menjemput masa depan Indonesia dengan keberanian adalah panggilan utama dan tugas bersama. Hanya dengan keberanian yang kokoh dan konsisten, bangsa ini dapat keluar dari bayang-bayang ketidakpastian dan menapak jalan menuju kemajuan sejati. Indonesia harus menjadi bangsa yang tidak hanya bertahan menghadapi gejolak dunia, tetapi mampu menjadi pelopor perubahan yang menginspirasi dan membawa manfaat besar bagi seluruh umat manusia. Masa depan yang gemilang menanti, dan keberanianlah kunci untuk membukanya.

BAB 7 Jalan Menuju Ketahanan Nasional Baru

Ketahanan Nasional adalah fondasi utama yang memungkinkan sebuah bangsa untuk tidak hanya bertahan dari berbagai tantangan, tetapi juga tumbuh dan mengambil peran kepemimpinan di tengah arus perubahan zaman. Bagi Indonesia, Ketahanan Nasional harus dipahami sebagai kerangka besar yang menghubungkan warisan nilai-nilai luhur bangsa dengan kebutuhan untuk beradaptasi pada dinamika global yang terus bergerak cepat. Ketahanan Nasional bukanlah titik akhir, melainkan proses berkelanjutan yang memastikan bangsa ini tetap relevan dan kuat menghadapi masa depan.

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak terduga, pendekatan lama dalam menjaga Ketahanan Nasional sudah tidak memadai lagi. Ketahanan yang diperlukan hari ini adalah ketahanan multidimensi yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan bangsa secara holistik. Ketahanan

ini harus adaptif terhadap perubahan cepat, kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi, serta memiliki visi jangka panjang yang kuat untuk mengantisipasi tantangan yang belum tampak di cakrawala. Ketahanan tersebut harus melekat erat dengan kepemimpinan nasional yang visioner, lembaga-lembaga negara yang tangguh, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu dimensi penting dalam membangun Ketahanan Nasional baru adalah ketahanan ideologi dan kebangsaan. Dalam menghadapi berbagai ancaman seperti radikalisme, intoleransi, dan pengaruh negatif globalisasi, bangsa ini membutuhkan generasi muda yang kokoh dalam nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pendidikan karakter yang berkelanjutan dan pemanfaatan media digital sebagai sarana penguatan narasi kebangsaan menjadi keharusan agar ideologi bangsa tetap hidup dan kuat di tengah arus perubahan.

Ketahanan sosial dan budaya juga menjadi pilar penting dalam Ketahanan Nasional. Dalam masyarakat yang semakin heterogen dan terbuka, menjaga kohesi sosial melalui penguatan toleransi, dialog antar budaya, serta pemberdayaan komunitas lokal adalah langkah strategis untuk menghindarkan perpecahan yang dapat melemahkan bangsa. Generasi muda, sebagai pengguna utama teknologi dan media sosial, memegang peran besar sebagai agen persatuan dan pembentuk budaya inklusif.

Dimensi ekonomi turut menjadi penentu kekuatan Ketahanan Nasional. Di era ekonomi digital dan ekonomi kreatif, pemuda sebagai pelaku utama inovasi dan kewirausahaan harus didukung penuh melalui akses modal, pelatihan keterampilan masa depan, serta kebijakan yang mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Ketahanan ekonomi yang kokoh akan memberikan basis stabil bagi ketahanan nasional secara keseluruhan.

Ketahanan ekologis tidak boleh diabaikan. Krisis iklim dan kerusakan lingkungan merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pelestarian alam dan pemanfaatan energi terbarukan harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam menjaga lingkungan adalah kunci keberhasilan transisi ini.

Selain itu, ketahanan digital menjadi aspek penting yang semakin krusial di era teknologi canggih. Negara harus mampu mengelola transformasi digital dengan bijak, meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan siber, dan mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional. Ketahanan digital yang kuat akan melindungi Indonesia dari ancaman siber dan memastikan kedaulatan digital nasional tetap terjaga.

Pada akhirnya, ketahanan nasional yang baru adalah hasil sinergi dari kepemimpinan yang berani dan visioner, kelembagaan yang responsif dan adaptif, serta partisipasi luas dari seluruh elemen bangsa. Lemhannas RI, sebagai lembaga strategis, berperan penting dalam mengembangkan pemimpin nasional yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan keberanian dan kecerdasan. Semua elemen bangsa harus bersatu, membangun Ketahanan Nasional yang inklusif dan progresif, agar Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu memimpin masa depan.

Jalan menuju Ketahanan Nasional baru adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan dihormati di dunia. Melalui kerja sama, inovasi, dan keberanian kolektif, Indonesia akan mampu menjawab panggilan zaman dan mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera dan berdaulat.

A. Membangun Ekosistem Ketahanan yang Dinamis

Dalam era global yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, pendekatan yang bersifat statis dan reaktif sudah tidak memadai lagi untuk menjaga Ketahanan Nasional. Bangsa yang ingin bertahan dan berkembang harus mampu membangun sebuah ekosistem Ketahanan Nasional yang dinamis—ekosistem yang tidak hanya mampu mengenali potensi disrupsi sejak dini, tetapi juga mampu mengantisipasi dan memitigasi dampaknya, serta merancang strategi adaptif untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Dinamika ini menjadi kunci agar bangsa tidak hanya bertahan, melainkan mampu memimpin arah perubahan global.

Ekosistem ketahanan yang dinamis harus dibangun atas beberapa pilar utama. Pertama, institusi strategis yang lincah dan inovatif menjadi fondasi penting. Lemhannas RI sebagai lembaga ketahanan nasional memiliki peran sentral dalam mengembangkan kapasitas analisis kebijakan berbasis data yang mendalam dan foresight strategis yang visioner. Dengan memadukan kecanggihan teknologi dan riset terkini, institusi ini harus mampu merespons perubahan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, kaderisasi kepemimpinan transformasional yang mengedepankan nilai keberanian, inovasi, dan kolaborasi harus menjadi agenda prioritas agar pemimpin masa depan siap menghadapi tantangan kompleks.

Kedua, masyarakat yang resilien dan berdaya merupakan komponen vital dalam ekosistem ini. Penguatan literasi kebangsaan yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan harus terus digalakkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa yang kokoh. Di era digital, literasi digital juga menjadi keharusan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus bijak, menghindari jebakan informasi negatif atau disinformasi. Selain itu, literasi ekologi yang menumbuhkan

kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup akan memperkuat ketahanan ekologis bangsa, sebuah aspek yang tidak boleh diabaikan di tengah krisis iklim global.

Ketiga, kepemimpinan nasional yang transformatif adalah motor penggerak utama dalam membangun ketahanan yang berkelanjutan. Kepemimpinan ini harus dilandasi keberanian moral untuk mengambil keputusan sulit demi kebaikan jangka panjang, kejelian strategis dalam membaca peluang dan ancaman, serta kematangan etis yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pemimpin yang demikian tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong inovasi dan perubahan positif yang progresif.

Keempat, kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan menjadi jaminan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata. Tidak ada satu pun kelompok yang boleh tertinggal atau terpinggirkan dalam proses transformasi nasional. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan, penguatan mekanisme partisipasi publik, dan transparansi tata kelola pemerintahan menjadi bagian integral dari ekosistem ketahanan yang dinamis.

Dengan membangun dan memelihara ekosistem ketahanan yang terdiri dari institusi inovatif, masyarakat berdaya, kepemimpinan transformatif, dan kebijakan inklusif, Ketahanan Nasional tidak lagi sekadar konsep statis. Ia akan menjadi kekuatan aktif yang menyatu dalam denyut nadi pembangunan bangsa, yang mendorong Indonesia untuk tidak hanya bertahan di tengah tantangan global, tetapi juga mengambil peran strategis sebagai negara yang tangguh, adaptif, dan visioner dalam tatanan dunia yang terus berubah. Inilah jalan bagi Indonesia menuju ketahanan nasional yang baru—ketahanan yang hidup, dinamis, dan penuh keberanian menghadapi masa depan.

B. Pilar Ketahanan Baru: Basis Strategi Indonesia Maju

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan abad ke-21, Indonesia memerlukan fondasi ketahanan nasional yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga hidup, dinamis, dan penuh keberanian untuk menghadapi masa depan. Buku ini mengusulkan kerangka enam pilar Ketahanan Nasional Baru yang menjadi basis strategis untuk mencapai visi Indonesia Maju. Keenam pilar tersebut adalah: Ketahanan Ideologi, Ketahanan Sosial Budaya, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekologi dan Iklim, Ketahanan Digital dan Teknologi, serta Ketahanan Tata Kelola Pemerintahan.

Pertama, Ketahanan Ideologi merupakan landasan utama yang meneguhkan pijakan bangsa dalam nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pilar ini menjadi tameng terhadap gempuran ideologi asing yang bisa mengikis jati diri dan semangat kebangsaan. Ketahanan ideologi bukan hanya soal menjaga doktrin, melainkan menghidupkan nilai-nilai luhur yang mampu menginspirasi generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersatu dan berkomitmen pada tujuan nasional.

Kedua, Ketahanan Sosial Budaya menegaskan pentingnya menjaga kohesi sosial dalam keberagaman Indonesia. Pilar ini mendorong toleransi, dialog antar kelompok, dan pelestarian budaya sebagai modal sosial utama. Dalam era digital yang serba cepat dan penuh disrupsi, ketahanan sosial budaya membantu meredam polarisasi dan konflik sosial, serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah perbedaan.

Ketiga, Ketahanan Ekonomi menjadi kunci utama untuk memastikan bangsa ini tidak hanya bertahan dari guncangan global, tetapi juga mampu berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Pilar ini menekankan penguatan ekonomi kreatif, kewirausahaan muda, serta digitalisasi UMKM sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, ketahanan ekonomi juga menuntut pengelolaan sumber daya secara efisien dan adil agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, Ketahanan Ekologi dan Iklim mencerminkan urgensi transformasi menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam harus berani mengambil langkah transformatif untuk melindungi ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pilar ini tidak hanya soal konservasi, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi ekonomi hijau yang dapat membuka peluang lapangan kerja baru dan menguatkan kedaulatan bangsa dalam aspek lingkungan hidup.

Kelima, Ketahanan Digital dan Teknologi menjadi pilar yang menegaskan posisi Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Dalam dunia yang semakin terhubung dan didorong oleh teknologi, bangsa ini harus memiliki kemampuan literasi digital tinggi, keamanan siber yang kuat, serta penguasaan teknologi strategis seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Pilar ini juga mengedepankan transformasi digital birokrasi dan pelayanan publik agar lebih efektif, transparan, dan inklusif.

Keenam, Ketahanan Tata Kelola Pemerintahan menempatkan kepemimpinan nasional dan sistem pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan partisipatif sebagai pilar penting. Ketahanan tata kelola mengharuskan terciptanya lembaga-lembaga yang adaptif terhadap perubahan, mampu menjawab aspirasi masyarakat, dan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar proses pembangunan berjalan berkeadilan dan berkelanjutan.

Keenam pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan nasional yang holistik. Pilar-pilar tersebut merupakan refleksi dari realitas kontemporer yang menuntut sinergi antara nilai-nilai budaya, teknologi maju, keberlanjutan lingkungan, dan kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil langkah strategis.

Dalam konteks Indonesia, pilar-pilar ini harus dimaknai lebih dari sekadar klasifikasi. Mereka adalah landasan transformasi

nasional yang inklusif dan memberdayakan. Pilar-pilar tersebut membuka ruang partisipasi luas bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang sosial. Dengan demikian, kohesi nasional yang kokoh dapat terbentuk sebagai kekuatan kolektif yang menguatkan daya tahan bangsa di tengah gejolak dunia yang terus berubah.

Melalui pembangunan enam pilar ketahanan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya sebagai negara yang tangguh dan mandiri, tetapi juga menegaskan keberanian kolektif untuk menjemput masa depan dengan optimisme dan kesiapan strategis. Pilar-pilar tersebut menjadi fondasi bagi bangsa untuk terus maju, berinovasi, dan memainkan peran utama di pentas global, memastikan Indonesia tetap menjadi bangsa pemimpin yang relevan dan dihormati di era modern.

C. Lemhannas RI: Navigator Ketahanan Nasional

Lemhannas RI memegang posisi yang sangat strategis dalam perjalanan bangsa menuju Ketahanan Nasional Baru. Sebagai lembaga yang sejak lama dikenal sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional, Lemhannas bukan sekadar institusi pembinaan para pejabat dan pemimpin negara, melainkan juga wahana penting dalam pengembangan pemikiran strategis nasional. Perannya meluas hingga menjadi laboratorium ide, tempat analisis tren global, serta pusat perumusan strategi yang dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah secara dinamis.

Rejuvenasi Lemhannas yang diangkat dalam buku ini bukan sekadar pembaruan administratif atau kosmetik kelembagaan semata. Transformasi ini adalah sebuah pembaharuan mendalam pada visi, misi, dan fungsi lembaga agar tetap relevan dan adaptif terhadap berbagai dinamika global dan nasional. Lemhannas harus menegaskan kembali identitasnya sebagai "Raksaka Dharma," yakni penjaga nilai-nilai kebangsaan yang kokoh, sekaligus menjadi pelopor dalam pembaruan strategis yang

progresif. Dalam konteks ini, rejuvenasi berarti memadukan kearifan masa lalu dengan inovasi masa kini untuk memastikan Lemhannas tetap menjadi pusat ketahanan dan kepemimpinan nasional yang responsif.

Salah satu langkah penting dalam rejuvenasi ini adalah mendorong pembaruan kurikulum yang berbasis pada tantangan kontemporer. Materi pendidikan tidak lagi boleh terpaku pada teori klasik, melainkan harus mencakup isu-isu terkini seperti transformasi digital, krisis iklim, dinamika geopolitik baru, serta perubahan sosial budaya yang cepat. Kurikulum yang inovatif ini akan membekali para peserta dengan wawasan luas dan kemampuan analisis strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas masalah nasional maupun global.

Selain itu, Lemhannas perlu mengembangkan jejaring kerja yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jejaring ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi dan pengalaman, tetapi juga sebagai platform kolaborasi dalam merumuskan solusi bersama. Melalui hubungan yang erat dengan lembaga strategis di dalam negeri, serta dengan institusi serupa di luar negeri, Lemhannas dapat memperkaya perspektif dan memperkuat daya saing bangsa di panggung dunia.

Keterlibatan generasi muda dan aktor-aktor baru dalam narasi ketahanan juga menjadi bagian vital dari strategi rejuvenasi. Lemhannas harus membuka ruang inklusif yang memungkinkan para inovator muda, akademisi, pelaku industri kreatif, dan masyarakat sipil berkontribusi aktif. Dengan demikian, narasi ketahanan tidak hanya dikonstruksi dari atas ke bawah, tetapi menjadi dialog intergenerasional yang dinamis dan penuh kreativitas.

Terakhir, Lemhannas juga harus tampil sebagai mitra aktif dalam diplomasi strategis Indonesia di kancah global. Melalui program pertukaran pemimpin muda, pelatihan lintas negara, dan

kajian bersama, Lemhannas dapat membantu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membentuk tatanan dunia yang adil dan berkelanjutan.

Dengan semua upaya tersebut, Lemhannas RI akan terus menjadi kompas strategis bangsa yang mampu mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang tangguh, bermartabat, dan penuh harapan. Sebagai navigator Ketahanan Nasional, Lemhannas bukan sekadar menjaga warisan bangsa, tetapi juga memimpin langkah-langkah inovatif demi kemajuan dan kejayaan Indonesia.

D. Kepemimpinan Nasional dan Ketahanan Berbasis Inovasi

Ketahanan Nasional adalah fondasi utama bagi kelangsungan dan kemajuan sebuah bangsa. Namun, fondasi ini tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner. Pemimpin adalah sosok penentu arah yang mampu mengarahkan bangsa melewati berbagai tantangan dan dinamika zaman yang terus berubah dengan cepat. Di era globalisasi dan revolusi teknologi yang berlangsung begitu masif, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang transformatif — kepemimpinan yang tidak hanya fokus menjaga stabilitas, tetapi juga proaktif mendorong inovasi dan perubahan struktural yang mendasar.

Kepemimpinan transformatif semacam ini memerlukan kualitas dan kemampuan yang jauh melampaui standar konvensional. Integritas menjadi landasan utama agar setiap keputusan dan tindakan pemimpin memiliki kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat luas. Di samping itu, kapasitas berpikir sistemik menjadi mutlak penting agar pemimpin mampu melihat persoalan secara holistik dan mengembangkan solusi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara simultan.

Keberanian mengambil risiko juga merupakan ciri khas kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Risiko yang dimaksud bukanlah tindakan gegabah, melainkan langkah berani yang didasari oleh perhitungan matang untuk membuka peluang perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan. Pemimpin masa depan harus mampu menggerakkan transformasi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang demi kemajuan bangsa.

Kemampuan membangun konsensus nasional yang luas menjadi aspek krusial lainnya. Indonesia yang majemuk membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kelompok, suku, dan generasi agar tercipta sinergi dalam membangun bangsa. Konsensus bukan sekadar kompromi, tetapi ruang dialog yang produktif dan inklusif untuk menemukan titik temu demi kepentingan bersama.

Secara konkret, pemimpin Indonesia masa depan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa dengan kecanggihan global yang terus berkembang. Sinergi antara kearifan lokal dan kemajuan teknologi modern akan memperkaya daya saing Indonesia sekaligus menjaga keunikan budaya yang menjadi pondasi jati diri bangsa.

Selain itu, pemimpin harus mampu menyusun strategi lintas sektor dan lintas generasi. Strategi yang terfragmentasi hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan sulit berkelanjutan. Sebaliknya, strategi lintas sektor yang menghubungkan ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan politik akan menciptakan harmoni dalam pembangunan nasional. Demikian pula, melibatkan generasi muda dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan adalah keharusan untuk memastikan kesinambungan dan relevansi kepemimpinan di masa depan.

Dalam kerangka tersebut, ketahanan nasional harus berbasis pada inovasi. Inovasi di bidang ekonomi, seperti pengembangan

ekonomi digital dan ekonomi hijau, menjadi motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas layanan publik melalui digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Sementara inovasi tata kelola pemerintahan mencakup reformasi birokrasi dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat serta dinamika global.

Lemhannas RI sebagai kawah candradimuka kaderisasi nasional memiliki peran sentral dalam melahirkan kepemimpinan jenis baru ini. Dengan program pendidikan dan pelatihan yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, Lemhannas harus menjadi tempat di mana para calon pemimpin bangsa tidak hanya belajar bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga dibekali kemampuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berdaya saing.

Singkatnya, kepemimpinan nasional yang kuat dan inovatif adalah prasyarat utama bagi Ketahanan Nasional Indonesia yang adaptif dan progresif. Melalui kepemimpinan yang integratif, visioner, dan berani, Indonesia dapat menjawab tantangan global dengan penuh percaya diri dan menjadi bangsa yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin perubahan di kancah dunia.

E. Menutup Masa Lalu, Membuka Masa Depan

Ketahanan Nasional adalah gambaran nyata dari semangat sebuah bangsa dalam menjaga jati dirinya sekaligus terus melangkah maju menuju kemajuan dan kesejahteraan. Ia bukan sekadar instrumen pertahanan yang bersifat statis atau defensif, melainkan sebuah instrumen peradaban yang dinamis dan progresif. Dalam dunia yang bergerak dengan cepat dan penuh ketidakpastian, bangsa yang mampu bertahan bukanlah yang paling kuat secara fisik semata, melainkan bangsa yang paling tangguh dalam beradaptasi dan mampu menciptakan nilai-nilai baru sebagai respons atas perubahan zaman.

Indonesia, dengan segala keunggulan dan keberagamannya, memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa besar dan berpengaruh di panggung dunia. Populasi yang besar memberikan kekuatan demografis; keberagaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal utama untuk pembangunan; serta sejarah panjang perjuangan yang sarat nilai-nilai kepahlawanan dan solidaritas menjadi fondasi kokoh yang harus terus diwariskan dan dikembangkan. Namun, semua potensi tersebut tidak akan bermakna tanpa adanya visi bersama dan Ketahanan Nasional yang kokoh sebagai pijakan fundamental.

Ketahanan Nasional yang kita butuhkan kini harus lebih dari sekadar mempertahankan apa yang ada. Ia harus menjadi payung besar yang mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan bangsa—ideologi, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan—dalam satu kesatuan yang utuh dan responsif terhadap tantangan global. Ketahanan yang demikian bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal bertransformasi, berinovasi, dan memimpin perubahan.

Masa lalu bangsa Indonesia, dengan segala kisah heroik dan perjuangannya, harus ditutup dengan rasa syukur dan kebanggaan, bukan dengan keterikatan yang menghambat kemajuan. Menutup masa lalu berarti melepaskan segala praktik, pola pikir, dan kebijakan yang sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman. Namun, menutup masa lalu tidak berarti melupakan akar dan jati diri; sebaliknya, itu adalah fondasi kuat yang menjadi pijakan untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.

Dalam konteks ini, rejuvenasi atau pembaruan menjadi kata kunci yang harus dipegang teguh. Semangat rejuvenasi bukan sekadar pembaruan formal atau kosmetik institusional, melainkan transformasi mendalam yang memperkuat dan menyegarkan institusi-institusi strategis bangsa. Lemhannas RI, sebagai lembaga sentral dalam penguatan Ketahanan Nasional dan kepemimpinan,

harus menjadi pelopor perubahan ini. Rejuvenasi Lemhannas berarti menyelaraskan peran dan fungsi lembaga dengan tantangan zaman, membuka ruang bagi inovasi, inklusivitas, dan partisipasi aktif generasi muda serta aktor-aktor baru dalam merancang masa depan bangsa.

Ketahanan Nasional harus menjadi lebih dari sekadar doktrin yang diajarkan di ruang kelas atau tertulis dalam buku-buku. Ia harus menjadi praktik hidup dan napas yang mengalir dalam setiap kebijakan negara, dalam gaya kepemimpinan yang visioner dan berani, serta dalam partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ketahanan Nasional yang hidup akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga bangsa ini mampu bergerak maju dengan mantap dan percaya diri.

Dengan semangat menutup masa lalu dan membuka masa depan, mari kita songsong era baru Indonesia dengan keberanian dan optimisme. Kita punya modal besar dan sumber daya yang melimpah, namun yang paling penting adalah kemauan kolektif untuk berinovasi, beradaptasi, dan bersatu dalam membangun Ketahanan Nasional yang kuat dan inklusif. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang bertahan, tetapi juga menjadi bangsa yang memimpin dan memberikan inspirasi bagi dunia. Masa depan Indonesia adalah milik kita semua, dan ia harus kita jemput dengan penuh keberanian dan semangat rejuvenasi yang tak pernah padam.

F. Menjadi Bangsa Pemimpin, Bukan Pengikut

Akhir dari perjalanan panjang buku ini membawa kita pada keyakinan fundamental bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara dengan potensi besar, melainkan sebuah bangsa yang mampu dan harus menjadi pemimpin di tengah peradaban dunia yang terus berubah. Di tengah arus global yang semakin kompleks dan dinamis, menjadi pengikut tidak lagi cukup; Indonesia harus berdiri di garis depan, mengambil peran strategis, dan mengukir

jejaknya sendiri dalam panggung internasional. Ketahanan Nasional Baru hadir sebagai kendaraan utama yang membawa bangsa ini menuju tujuan mulia tersebut.

Ketahanan Nasional Baru bukan sekadar konsep pertahanan tradisional yang hanya berfokus pada stabilitas keamanan. Ia adalah kerangka strategis yang menyatukan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara—ideologi, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan—dalam satu visi terpadu yang menyiapkan Indonesia untuk menghadapi tantangan dan peluang abad ke-21. Melalui ketahanan yang holistik dan inklusif ini, bangsa kita dapat memetakan masa depan bersama yang berlandaskan nilai-nilai luhur kebangsaan, kreativitas tanpa batas, dan solidaritas sosial yang kokoh.

Menjadi bangsa pemimpin menuntut keberanian yang nyata—keberanian untuk mengambil risiko, berinovasi, dan melampaui batas-batas konvensional. Keberanian ini harus tertanam dalam setiap aspek kepemimpinan nasional, mulai dari pembuat kebijakan hingga para pelaku di lapangan. Lemhannas RI sebagai pusat pembinaan kepemimpinan dan pengembangan strategi nasional memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa setiap generasi pemimpin Indonesia lahir dengan kesiapan mental, kecakapan intelektual, dan semangat transformasi yang tinggi. Pemimpin yang berani adalah pemimpin yang tidak sekadar bertahan dalam tekanan zaman, tetapi yang mampu menciptakan masa depan baru yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Ketahanan Nasional yang kita bangun bukan hanya tameng untuk melindungi bangsa dari ancaman luar maupun dalam. Ia juga tangga yang membawa kita naik menuju cita-cita besar bangsa: Indonesia yang berdaulat penuh, berkeadilan sosial, makmur secara ekonomi, berkelanjutan secara ekologis, dan aktif berperan dalam membentuk tatanan dunia yang lebih manusiawi dan beradab. Dalam kerangka inilah, pembangunan nasional

harus dilandasi oleh prinsip-prinsip inklusivitas, keberpihakan pada rakyat, dan integritas moral yang kuat.

Kita tidak boleh ragu untuk bermimpi besar dan bergerak cepat dengan langkah-langkah strategis. Dunia terus berubah dengan kecepatan luar biasa—teknologi baru muncul, pergeseran geopolitik terjadi, tantangan iklim semakin nyata. Indonesia harus mampu membaca dinamika ini dengan jeli dan mengubahnya menjadi peluang, bukan hambatan. Oleh karena itu, semangat kolaborasi lintas sektor, pengembangan sumber daya manusia unggul, dan inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memperkuat Ketahanan Nasional kita.

Sebagai bangsa yang kaya sejarah dan budaya, kita juga harus menjaga akar nilai-nilai kebangsaan yang kuat—Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong—sebagai fondasi moral yang menguatkan seluruh upaya pembangunan dan transformasi. Keberanian kita bukan berarti meninggalkan nilai-nilai tersebut, melainkan menghidupkannya dalam konteks modern, agar tetap relevan dan memberi inspirasi bagi generasi masa depan.

Mari kita bersama-sama menjemput masa depan dengan keberanian dan keyakinan penuh. Jadikanlah Ketahanan Nasional sebagai energi penggerak bangsa untuk maju, bukan hanya bertahan. Indonesia yang kita impikan adalah Indonesia yang menjadi pemimpin, bukan pengikut; Indonesia yang mampu memberikan kontribusi besar bagi dunia, sekaligus melindungi dan memajukan seluruh rakyatnya. Dengan semangat ini, kita melangkah ke depan, menulis sejarah baru yang penuh harapan dan kejayaan. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua—mari kita raih dengan keberanian dan tekad bulat.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail*. New York: Crown Publishing.

Asian Development Bank. (2021). *Asian Development Outlook*. Manila: ADB.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2022). *Laporan Keamanan Siber Nasional*. Jakarta: BSSN.

Bambang, B. (2018). Pendidikan Karakter dan Ketahanan Bangsa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 1–15.

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI.

BPJS Ketenagakerjaan. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja*. Jakarta: BPJS TK.

BPPT. (2020). *Roadmap Teknologi Nasional*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.

CSIS Indonesia. (2022). *Laporan Kebijakan Strategis Nasional*. Jakarta: CSIS.

Darmawan, D. (2018). *Teknologi Pembelajaran Inovatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fukuyama, F. (2013). *Political Order and Political Decay*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.

Harvard Kennedy School. (2018). *Innovating Government: Building Better Bureaucracies*. Cambridge: Harvard University Press.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Laporan Tahunan Korupsi*. Jakarta: ICW.

Indonesian Ministry of Finance. (2021). *Green Sukuk Report*. Jakarta: MoF.

IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.

KEMENPORA. (2022). *Strategi Pemberdayaan Pemuda Nasional*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Status Hutan Indonesia 2021*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *RPJMN 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.

Kominfo. (2020). *Strategi Nasional Literasi Digital Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KPU RI. (2020). *Indeks Partisipasi Politik Generasi Muda*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Lembaga Demografi UI. (2022). *Peta Digitalisasi UMKM Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.

Lemhannas RI. (2020). *Ketahanan Nasional: Konsepsi dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lemhannas Press.

LIPI. (2020). *Kajian Ketahanan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mahbubani, K. (2018). *Has the West Lost It?*. London: Penguin Books.

McKinsey & Company. (2019). *The Future of Asia: Asian Flows and Networks*. Singapore: McKinsey Global Institute.

Megawati, S. (2015). *Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Pustaka Nasional.

Mhlanga, D., & Dzingirai, M. (2021). Artificial Intelligence and the Future of Primary Education in Africa. *Education and Information Technologies*, 26(5), 5441–5462.

Nasution, M. (2020). Membangun Ketahanan Nasional Melalui Kepemimpinan Transformasional. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 8(1), 45–58.

OECD. (2021). *Green Growth and Sustainable Development Policies*. Paris: OECD Publishing.

Prasetyo, A. (2021). Kedaulatan Data dalam Ketahanan Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 9(3), 145–160.

Putra, Panca R.Z.S, et.al (2025). Lemhannas Reborn: Strategi Membangun Daya Saing dan Ketahanan Bangsa, IPB Press

Rifai, H. (2019). Kepemimpinan di Era Disrupsi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 122–137.

Rifkin, J. (2011). *The Third Industrial Revolution*. New York: Palgrave Macmillan.

Sassen, S. (2006). *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton: Princeton University Press.

Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.

Suwondo, B. (2020). Generasi Z dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 33–49.

Syadzily, Ace Hasan, et.al. (2025). Geopolitik Global : Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional, IPB Press

Syadzily, Ace Hasan, et.al. (2025). GeoSibernetik, Dinamika Sistem Global Dan Transformasi Teknologi

Syadzily, Ace Hasan, et.al. (2025). School of Strategic Leaders: Mencetak Pemimpin Bangsa di Era Ketidakpastian Global, UNJ Press

Syadzily, Ace Hasan, et.al. (2025). Young Political Leaders: Menjawab Tantangan Zaman, Mengukir Masa Depan Bangsa, UNJ Press

Syadzily, Ace Hasan. (2025). Ketahanan Nasional Wujudkan Indonesia Maju: Dari Stabilitas menuju Inovasi Berkelanjutan, Rejuvenasi Lemhannas: Pilar Ketahanan Nasional, Orasi Kebangsaan Lemhannas RI, Jakarta, 20 Mei

Taufik, A. (2019). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 65–80.

Tempo. (2022). "Peran Lemhannas RI dalam Mengawal Ketahanan Nasional." *Majalah Tempo*, 7 Oktober 2022.

The Jakarta Post. (2023). "Indonesia's Green Economy Ambition Faces Policy Gaps." *The Jakarta Post*, 12 April 2023.

Toynbee, A. J. (1946). *A Study of History*. Oxford: Oxford University Press.

Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Berlin: TI.

UN ESCAP. (2021). *The Future of Asia-Pacific Youth*. Bangkok: United Nations ESCAP.

UNDP. (2022). *Human Development Report 2022*. New York: United Nations Development Programme.

UNESCO. (2021). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO.

UN-Habitat. (2020). *Smart Cities and Urban Innovation*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

Wahyono, T. (2019). Kepemimpinan Nasional dan Tantangan Global. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 165–180.

Widjajanto, A. (2023). *Strategi Pertahanan Nasional Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widodo, J. (2019). Visi Indonesia Maju 2045. *Orasi Kenegaraan Presiden RI*, 16 Agustus 2019.

World Bank. (2020). *Digital Economy for Indonesia: Opportunities and Challenges*. Washington, DC: World Bank.

World Economic Forum. (2023). *Global Risks Report*. Geneva: WEF.

TENTANG PENULIS

Dr. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si

Tubagus Ace Hasan Syadzily, lahir di Pandeglang, Banten, 19 September 1976, adalah seorang akademisi dan politisi yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada 22 Oktober 2024. Dikenal dengan panggilan Kang Ace, ia telah menjalani karier politik sebagai anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai GOLKAR selama empat periode berturut-turut sejak 2009 hingga 2029. Kang Ace juga pernah menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan Agama dan Sosial pada periode 2018-2024.

Jejak pendidikannya berawal dari dunia pesantren, menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Cipasung dan MAN Sukamanah Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia meraih gelar Sarjana Sastra Arab dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, Kang Ace menuntaskan pendidikan S2 di bidang Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 2003. Pada 2014, ia meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Saat ini, Kang Ace tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah

mengajar di program pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute sejak 2020 dan sering diundang sebagai narasumber dalam seminar, lokakarya, dan kuliah umum.

Kang Ace memulai kiprah organisasinya sejak masa mahasiswa, menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah (1999-2000) dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia juga pernah menjabat posisi penting di beberapa organisasi pemuda dan keagamaan, seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam dunia politik, Kang Ace telah lama berkecimpung di Partai GOLKAR, menjabat pengurus DPP dan memimpin Partai GOLKAR Jawa Barat periode 2020-2025, serta kini sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR. Selain aktivitas politik, ia aktif menulis karya ilmiah dan sering menjadi narasumber di media cetak, online, maupun elektronik.

www.ace-hasan.com

Komjen Pol Drs. R.Z Panca Putra S., M.Si

Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, lahir di Balige, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 19 Januari 1969, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 8 September 2023 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990 dan memiliki pengalaman luas di bidang reserse.

Karier kepolisiannya dimulai dengan berbagai penugasan strategis, termasuk sebagai Kapolres Banyumas (2009) dan Kapolres Tegal (2010). Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jawa Tengah, kemudian dipercaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalimantan Tengah.

Antara tahun 2013 hingga 2017, Panca mengabdi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri. Pada 2017, ia menjabat sebagai Direktur Penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat reputasinya dalam penegakan hukum. Pada tahun 2020, ia kembali ke Polri sebagai Widyaiswara Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri, sebelum kemudian ditugaskan sebagai Kapolda Sulawesi Utara (2020) dan Kapolda Sumatera Utara (2021–2023).

Setelah dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Lemdiklat pada Juli 2023, Panca ditunjuk sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI pada September 2023 menggantikan Komjen Rudy Sufahriadi. Dua minggu kemudian, ia dipromosikan menjadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).

Dengan pengalaman akademik dan operasional yang seimbang, Komjen Pol. Panca berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan Lemhannas RI dalam menjawab tantangan strategis nasional, serta mendorong penguatan ketahanan nasional yang adaptif dan visioner.

Prof. Dr. Ir Dadan Umar Daihani, DEA, IPU, Asean-Eng

Dadan Umar Daihani adalah akademisi dan profesional senior yang berperan strategis dalam penguatan Ketahanan Nasional Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Senior Lemhannas RI serta Analis Senior di Laboratorium Ketahanan Nasional dan Tenaga Profesional bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI. Selain itu, ia juga merupakan dosen tetap di Universitas Trisakti.

Dadan dikenal sebagai salah satu penggagas sistem Indeks Ketahanan Nasional yang dikembangkan sejak tahun 2007. Sistem ini digunakan secara berkala untuk mengukur ketahanan nasional Indonesia. Atas kontribusinya, sistem ini meraih *Innovation Achievement Award* dari ESRI, San Diego, Amerika Serikat, pada tahun 2018.

Pengalaman profesionalnya sangat luas, antara lain sebagai Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Direktur Trisakti International Business School, dan Direktur Keuangan PT

Sunda Raya. Ia juga pernah menjadi anggota Board of Directors Perkasa Equatorial Sembakung Ltd (TAC-Pertamina), Direktur PT Cipta Eko Lestari, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Exein Health Initiative (EHI).

Dalam bidang akademik, Dadan tidak hanya aktif mengajar, tetapi juga kerap diundang sebagai dosen tamu dan penguji program doktor di berbagai perguruan tinggi ternama seperti UNHAN, UI, UGM, ITB, serta Maastricht School of Management, Belanda. Ia juga aktif sebagai pembicara dalam forum-forum internasional seperti Jakarta Geopolitical Forum (JGF), GIS User Conference (San Diego), KNDU (Korea National Defense University), serta ICCED 2021.

Dadan meraih gelar Insinyur Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1979), serta gelar Master (1990) dan PhD (1993) di bidang Sistem Manajemen Produksi Otomatis dari Universitas D'Aix Marseille III, Prancis.

Ia juga merupakan anggota pendiri Asosiasi Institut Teknik dan Manajemen Industri, serta aktif di berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Dosen Indonesia (ADI) dan Ikatan Insinyur Indonesia. Dadan dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam membangun integrasi antara sains, kebijakan publik, dan ketahanan nasional.

Dr. Dadang Solihin, SE, MA

Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (2011).

Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).

Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah *Associate Professor*/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.

Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021. Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.

Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan *Bike to Work* ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan *Policy Paper*nya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

TENTANG EDITOR

Dr. Sahat Marisi Hasibuan, S.H., S.I.K., M.H.

Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan, S.H., S.I.K., M.H. saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Polair di Baharkam Polri. Ia lahir di Jakarta Pusat pada 9 Agustus 1975 dan telah mengabdikan diri dalam institusi kepolisian selama lebih dari dua dekade, sejak lulus dari Akademi Kepolisian (AKABRI) pada tahun 1997.

Dr. Sahat memiliki latar belakang akademis yang kuat dan multidisipliner. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jakarta (2002), melanjutkan ke jenjang Magister Hukum di Universitas Diponegoro (2015), dan berhasil meraih gelar Doktor di bidang hukum dari universitas yang sama pada tahun 2024. Kombinasi antara pengalaman operasional di lapangan dan keilmuan hukum menjadikannya sosok pemikir strategis, terutama dalam isu keamanan, ketertiban masyarakat, dan kebijakan publik.

Dalam karier kepemimpinannya, ia pernah menduduki berbagai posisi penting di lingkungan Polri, antara lain Kapolres Bantul, Dirpolairud Polda Sumatera Barat, Wakapusdik Polair, serta sejumlah jabatan di bidang reserse dan narkoba di wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam terhadap isu keamanan lokal dan nasional,

termasuk yang berkaitan dengan konflik agraria, sumber daya kelautan, dan ketahanan pangan.

Prestasinya diakui melalui berbagai penghargaan, seperti Bintang Bhayangkara Narariya (2022) dan Satyalancana Pengabdian 24 Tahun (2024). Saat ini, ia mengikuti Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), yang menunjukkan peran strategisnya dalam merumuskan arah kebijakan nasional berbasis pendekatan multidisipliner dan berorientasi pada ketahanan nasional.

Vicky Fernando, S.E., M.Ak.,CRMO., CBV., CTIA.

Vicky Fernando, SE, M.Ak, CRMO, CBV, CTIA, adalah seorang profesional multidisiplin yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen risiko, dan kebijakan perdagangan. Dengan pengalaman lintas sektor di lembaga pemerintahan, BUMN, dan swasta, ia dikenal sebagai sosok yang berkomitmen terhadap isu-isu strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kedaulatan pangan.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, baik pada jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2), Vicky telah melengkapi keilmuan akademisnya dengan berbagai sertifikasi profesi bergengsi, seperti Certified Risk Management Officer (CRMO) dari BNSP, Certified Business Valuer (CBV) dari Academy Finance & Management Australia, dan Certified Internal

Auditor (CTIA). Sertifikasi ini mencerminkan kepakarannya dalam mengelola risiko, menilai nilai bisnis, serta meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas institusi.

Dalam kiprahnya di sektor publik, Vicky menjabat sebagai Anggota Komite Antidumping Indonesia (KADI) di bawah Kementerian Perdagangan sejak tahun 2014. Dalam posisi strategis ini, ia terlibat langsung dalam berbagai penyelidikan kasus trade remedies yang menyangkut perlindungan industri nasional dari praktik perdagangan tidak sehat, seperti dumping dan subsidi tidak adil. Ia terlibat aktif dalam kasus-kasus besar seperti antidumping baja, gandum, hingga produk hortikultura, yang sebagian besar beririsan langsung dengan isu pangan nasional. Pengalaman ini memberinya perspektif tajam tentang rapuhnya ketahanan pangan Indonesia akibat tekanan dari sistem perdagangan global.

Tak hanya itu, Vicky juga sering mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional, antara lain sebagai delegasi Republik Indonesia di Rules Meeting World Trade Organization (WTO) di Jenewa, Swiss, pada tahun 2017 dan 2019, serta dalam berbagai workshop regional di Asia. Ia juga menjadi bagian dari tim teknis ASEAN dalam Working Group Trade Remedies (WGTR) dan secara aktif menyampaikan materi dalam forum-forum komunikasi antara pemerintah dan dunia akademik serta pelaku usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di sektor BUMN, ia menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Yodya Karya (Persero), di mana ia turut mengawasi proyek strategis nasional, seperti pembangunan kawasan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), IPAL KIPP IKN, hingga gedung-gedung pendidikan dan infrastruktur kereta api, Ia tercatat—sejak tahun 2025 sebagai Anggota Komite Audit di PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)-- Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai bagian dari solusi strategis untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M.

Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M. adalah seorang akademisi, penulis, dan praktisi bisnis yang aktif dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Ia lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 11 Juni 1977. Bersama istrinya, Sari Rahma Yulianthi, ia dikaruniai empat putra: Atha Adiwidya Ludfi, Artawidya Ihsan Ludfi, Widyatama Cendekia Ludfi, dan Setya Widyarachma Ludfi.

Perjalanan akademisnya dimulai dari D3 Pertanian di Universitas Lampung (1998), dilanjutkan S1 Studi Pembangunan di Universitas Sahid Jakarta. Ia menyelesaikan Magister Manajemen pada Pascasarjana Universitas Sahid (2008), dan meraih gelar Doktor MSDM dari Universitas Negeri Jakarta.

Karier profesionalnya mencakup pengalaman sebagai tenaga pemasar di PT Kimia Farma Tbk, serta berbagai posisi strategis di PT Jamkrida Jakarta, termasuk sebagai Kepala Divisi Unit Usaha Syariah dan Kepala Divisi HR & GA. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris di JadiHebat.id (PT Sumber Daya Multi Cendekia).

Dr. Antoni juga dikenal sebagai akademisi aktif. Ia adalah associate professor di Institut STIAMI, dosen S2 di Universitas Paramadina, tutor di Universitas Terbuka, serta dosen di program S3 Universitas Negeri Jakarta. Ia juga aktif dalam organisasi profesi seperti IKADIM (Ketua Bidang Kerja Sama dengan Korporasi), FORDOBI (Sekjen 2022–2027), dan IKADA UNJ.

Sebagai penulis produktif, karyanya mencakup lebih dari 15 buku bertema kepemimpinan, pengembangan diri, penjaminan syariah, dan SDM unggul. Buku-bukunya diterbitkan oleh

penerbit nasional seperti Gramedia dan IPB Press, antara lain *Be A Writer, Building Personal Brand Equity, Mantra, Kepemimpinan Cendekia*, dan *Penjaminan Pembiayaan Syariah*.

Ia adalah pendiri SDM Cendekia dan penggagas strategi pembangunan SDM Unggul berbasis nilai-nilai intelektual, spiritual, dan profesional melalui tulisan, pelatihan, dan seminar nasional maupun internasional.

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

TANHANA DHARMMA MANGRVA

REJUVENASI LEMHANNAS RI

GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

Di tengah pusaran perubahan global yang serba cepat dan tak menentu, Indonesia membutuhkan institusi strategis yang mampu menjadi motor ketahanan dan pembaruan kebangsaan. Buku REJUVENASI LEMHANNAS RI: Guna Mewujudkan Indonesia Maju hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman: bagaimana Lemhannas RI, kawah candradimuka kepemimpinan nasional, harus bertransformasi menjadi lembaga visioner yang adaptif, inklusif, dan relevan untuk masa depan Indonesia.

Disusun oleh tim penulis yang berpengalaman dan berwawasan luas, buku ini membedah kompleksitas tantangan bangsa—dari krisis iklim, disrupsi teknologi, hingga polarisasi sosial—dan menawarkan enam pilar ketahanan nasional baru sebagai arsitektur strategis menuju Indonesia Emas 2045. Buku ini tidak hanya menyoroti pentingnya rejuvenasi kelembagaan, tetapi juga menggugah generasi muda, pemerintah, akademisi, dan seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif membangun ekosistem ketahanan yang dinamis, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta narasi yang inspiratif, buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang peduli pada masa depan Indonesia. Temukan gagasan, strategi, dan visi besar untuk memperkuat fondasi bangsa—karena di era baru ini, hanya bangsa yang mampu memperbarui diri dan menjaga jati diri yang akan bertahan dan memimpin di panggung dunia.

Penerbit UNJ Press
Gd. Ki Hajar Dewantara, Lantai 5, Kampus A
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Rt. 11/ RW. 14
Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220
Email: *edura.unj@unj.ac.id* atau *unj.press@unj.ac.id*
CP: 081296964182